



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)

SKRIPSI

OLEH:

SEPTI NOPANDRI
NIM. 11375201574



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

SEPTI NOPANDRI
NIM. 11375201574



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

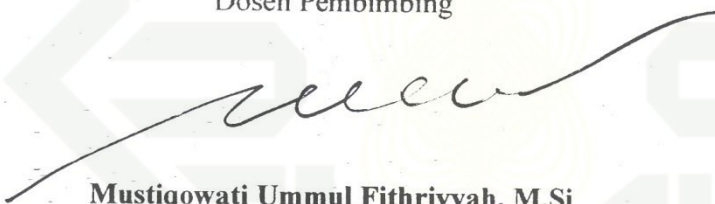
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA	: SEPTI NOPANDRI
NIM	: 11375201574
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN	: ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing



Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
NIP. 19791127 200801 2 010

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara




Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SEPTI NOPANDRI
 NIM : 11375201574
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)
 HARI/TGL UJIAN : JUMAT, 27 September 2019

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Ikhwani Ratna, SE, M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014

PENGUJI II

Virna Museliza, SE, M.Si
NIK. 130 712 073



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara mu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat ... (Q.S. Al-Mujadalahah : 11)

Kunci ilmu adalah bertanya dengan baik dan serius mendengar
 Kunci kemenangan adalah sabar
 Kunci penambahan nikmat adalah Syukur

Ya Allah ya Rabbi... puji syukur kepada-Mu yang selalu memberikan kesabaran dan ketabahan kepadaku dalam mengarungi liku hidup ini. Ya Rabb... Atas izin dan ridho-Mu jika aku dapat menyelesaikan amanah ini, bantu aku ya Allah agar ilmu yang diperoleh bisa kumfaatkan di jalan yang Engkau ridhoi.... Amin.

Kupersembahkan karya kecil ini teruntuk ayahanda Abasri dan ibunda Rosita tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang kepada sedari kecil. Ayah.... Bunda... Kesabaran dan keikhlasannya dalam mendidik anak-anakmu merupakan peneguh langkah ini dalam menggapai cita-cita ananda. Tanpa do'a dan restu ayah bunda tiada mungkin ananda akan tegar mengarungi liku perjuangan ini... semoga Allah meridhoi semua pegorbanan ayah dan bunda dalam mendidik dan membimbing ananda untuk menjadi yang terbaik,

Kupersembahkan juga karya ini untuk kakakku tercinta Helmi, Rosna Wainar, Karmison, Sariful terima kasih atas dukungan dan do'anya. Dan juga untuk Keluarga Besar lainnya yang selalu menghadirkan keceriaan dalam hidupku. Do'a ku, semoga Keluarga Besar Abasri selalu Harmonis.

Terimakasih buat teman-temanku seperjuangan (Administrasi Negara A 13) yang telah memberi dukungan dan berbagi pengalaman semasa dibangku kuliah dan sahabat-sahabatku Mestra Lestari, S.Sos, Zenwar Subianto, S.Kom, dan Muhammad Harir yang telah memberi semangat dan dorongan diluar masa perkuliahan, semoga teman-teman yang belum agar dapat menyusul mendapatkan gelar segera ya...Amin....

Pekanbaru, September 2019
 Penulis

Septi Nopandri, S.Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)**

OLEH

SEPTI NOPANDRI
NIM. 11375201574

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, pada Januari hingga Maret 2018. Adapun ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan insentif pemungutan serta faktor penghambat kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi lapangan kemudian data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Informan dalam penelitian ini dari elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan insentif pemungutan, dalam kategori belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari sumber daya manusia (staf) dilihat dari segi kuantitas belum mencakup keseluruhan wajib pajak, sanksi yang ada dalam perda belum dijalankan sepenuhnya, pemberian insentif pemungutan yang belum mampu meningkatkan kinerja pegawai serta faktor penghambat yaitu jangkauan geografis dan jangkauan pengawasan belum cukup maksimal karena tempat yang masih pedesaan dan jauh.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran *dzat wajibal wujud* Allah *Subhanahu wata'ala*, yang telah memberi berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi *suritauladan* bagi seluruh umat islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kehilafan, untuk itu kepada Allah *Subhanahu wata'ala* penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Abasri dan Ibunda Rosita yang selalu senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan doa kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada segenap keluarga besar Helmi, Rosna Wainar, Karmison S.Sos, dan Sariful serta semua keluarga besar yang ada di Kuansing Kecamatan Pangean dan semua keluarga besar yang ada di Suka Ramai dan Air Tiris dari penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memotivasi dan menguatkan semangat penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN SUSKA RIAU.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, semoga Administrasi Negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN SUSKA RIAU.
4. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara dan selaku Penasehat Akademis penulis yang banyak meluangkan waktu, memberi masukan dan membimbing serta memberikan arahan yang baik.
5. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Pembimbing Akademik, semoga Administrasi Negara menjadi Jurusan terbaik di UIN SUSKA RIAU.
6. Ibu Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd, M.Si selaku dosen konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberi masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam membuat skripsi.
7. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi proposal yang senantiasa membimbing dan memberi masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam membuat proposal.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
9. Kepada Pemerintahan Kab. Kuantan Singingi Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Pangean, Kelurahan, dan seuruh instansi kelembagaan yang terlibat didalam peelitian ini.
10. Kepada sahabat sekaligus keluarga penulis Mesra Lestari, S.Sos yang selalu senantiasa memberi semangat dan motivasi bagi penulis serta selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung penulis dan nasihat-nasihatnya yang membuat penulis berhasil sampai seperti sekarang ini.

1. Kepada sahabat-sahabat Pipi Arlianti, S.Sos, Lina Afriyanti, Nova Aina, S.IKom, Zenwar Subianto, S.Kom, Muhammad Harir, Ericson Oktorandesta, S.Sos yang selalu membantu penulis dan memberi semangat serta nasehat yang berguna bagi penulis serta adik-adik kos Siti Fatimah, Dara Arifah, Rila Gustila yang selalu memberi semangat kepada penulis.

1. Kepada teman-teman ANA A yang sama-sama seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Kebijakan Publik	11
2.2 Implementasi Kebijakan	14
2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan	15
2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	32
2.4 Insentif Pemungutan	33
2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	37
2.5.1 Pengertian	37
2.5.2 Nama, Objek, dan Subjek Pajak	38
2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak	40
2.5.4 Pemungutan dan Pembayaran	42
2.5.5 Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak	43
2.5.6 Tata Cara Pembayaran	44
2.5.7 Tata Cara Penagihan	45
2.5.8 Insentif Pemungutan	47
2.5.9 Pelaksana	48
2.6 Pandangan Islam Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	49
2.7 Penelitian Terdahulu	51
2.8 Konsep Operasional Penelitian	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Kerangka Pemikiran Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Jenis Penelitian	56
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	56
3.3	Jenis dan Sumber Data	57
3.3.1	Data Primer	57
3.3.2	Data Sekunder	57
3.4	Teknik Pengumpulan Data	58
3.5	Informan Penelitian	59
3.5.1	Kriteria Informan penelitian.....	59
3.6	Analisa Data	60
BAB IV GAMBARAN UMUM		62
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	62
4.2	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
4.2.1	Kecamatan Pangean	64
4.2.2	Badan Pendapatan Daerah.....	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		85
5.1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	85
5.1.1	Komunikasi	86
5.1.2	Sumber Daya.....	90
5.1.3	Disposisi.....	95
5.1.4	Struktur Birokrasi.....	99
5.1.5	Insentif Pemungutan.....	104
5.1.6	Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaa dan Perkotaan.....	105
5.2	Analisa Hasil Penelitian	107
5.2.1	Komunikasi	107
5.2.2	Sumber Daya.....	112
5.2.3	Disposisi.....	115
5.2.4	Struktur Birokrasi.....	115
5.2.5	Insentif Pemungutan.....	118
5.2.6	Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	121
6.1 Kesimpulan.....	121
6.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Potensi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2018 Kecamatan Pangean.....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Pangean... .	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	51
Tabel 2. 2 Konsep Operasional Penelitian	53
Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi	63
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Pangean.....	65
Tabel 4. 3 Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangean.....	65
Tabel 4. 4 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	66
Tabel 4. 5 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Mata Pencarian.....	67
Tabel 5.1 Nama Koordinator dan Kolektor Desa PBB-P2 di Kecamatan Pangean.....	92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut G.C Edward III	17
Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn	18
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Pangean.....	68
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi..	
.....	84
Gambar 5. 1 Penunjukan Petugas PBB-P2 dan PBB-Perkebunan.....	100
Gambar 5. 2 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Perda Nomor 1 tahun 2013	
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di	
Kabupaten Kuantan Singingi	102
Gambar 5. 3 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Perda Nomor 1 tahun 2013	
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di	
Kabupaten Kuantan Singingi	102
Gambar 5. 4 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Perda Nomor 1 tahun 2013	
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di	
Kabupaten Kuantan Singingi	103



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Muhammad Rusjdi (2008 : 1) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Pajak Daerah Retribusi Daerah, PBB-P2 diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Kab./Kota) selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013. Dengan demikian, maka mulai Tahun pajak 2014, PBB P2 menjadi Pajak Kab./Kota. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 %. Setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara resmi telah diserahkan ke Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. PBB-P2 itu diserahkan ke Kantor BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi terhitung dari tanggal 1 Januari 2013. Realisasi penerimaan dari PBB-P2, berdasarkan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) 2018 yang telah dicetak dan siap didistribusikan itu, jelas akan menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuantan Singingi. Berikut adalah jumlah SPPT di Kecamatan Pangean:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Potensi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2018 Kecamatan Pangean

No.	Nama Desa	JUMLAH SPPT
1	Pasar Baru Pangean	1.126
2	Pembatang	344
3	Padang Kunyit	196
4	Padang Tanggung	87
5	Teluk Pauh	115
6	Tanah Bekali	225
7	Pulau Deras	178
8	Pulau Kumpai	297
9	Pulau Tengah	214
10	Koto Pangean	90
11	Sukaping	170
12	Pulau Rengas	253
13	Pauh Angit	261
14	Rawang Binjai	156
15	Sako	665
16	Sungai Langsung	425
17	Pauh Angit Hulu	174
Jumlah		4.976

Sumber: BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar jumlah wajib pajak yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 4.976 wajib pajak. Dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang memiliki jumlah wajib pajak yang cukup besar. Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Pangean

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	70.369.911	16.585.651	23,57
2017	70.369.911	20.363.332	28,94
2018	79.909.176	38.869.425	48,6

Sumber: BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

Pada tabel diatas tahun 2016 target sebanyak 70.369.911 dan realisasi 16.585.651. Pada tahun 2017 target sebanyak 70.369.911 dan realisasi 20.363.332. Dan pada tahun 2018 target sebanyak 79.909.176 dan realisasi 38.869.425. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belum tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang ada di Kecamatan Pangean yang sudah ditargetkan untuk daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari observasi awal, peneliti mendapat temuan yang didapatkan dari wawancara dengan pegawai Bapenda bahwa dalam pelaksanaan Perda Kab. Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan yaitu melalui sosialisasi seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan melalui media cetak yang berupa spanduk. Namun dalam pelaksanaannya, sosialisasi masih terasa kurang. Hal ini dilihat dari kantor kecamatan yang tidak melibatkan atau mengundang seluruh perangkat desa. Sosialisasi tidak maksimal karena berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan ternyata tidak semua perangkat desa hadir atau diundang oleh pihak kecamatan. Sehingga ini menyebabkan informasi mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tidak sampai kepada seluruh masyarakat. Serta sosialisasi melalui media cetak itu belum sampai ke lapisan masyarakat dipedesaan. Tidak banyak masyarakat desa yang dapat mengakses informasi melalui media cetak terkait dengan sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hal tersebutlah peneliti menduga sosialisasinya kurang dan mengujinya melalui wawancara kepada informan.

Dan menanggapi hal tersebut pihak BAPENDA selaku pelaksana kebijakan sesuai dengan Perda Kab. Kuansing Nomor 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada pasal 13 sampai dengan 20 menjelaskan bagaimana tata cara pembayaran dan tata cara penagihan yang didalamnya diatur juga mengenai sanksi.

Pada pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan”. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak diberi kesempatan untuk mengurus pajak terutangnya dalam hal mengangsur selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang ditentukan. Namun jika hal tersebut belum juga diurus oleh wajib pajak maka pada pasal 14 ayat (3) berbunyi: “penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar”. Namun jika belum juga dibayar oleh wajib pajak maka pada pasal 15 ayat (2) dikatakan bahwa: “surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dan ketika wajib pajak belum juga membayar pajaknya, pada pasal 16 ayat (1) berbunyi: “apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa. Pada pasal 18 dikatakan bahwa: “apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan”. Dan pada pasal 19 ayat (1) menyatakan: “setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara”.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang menunggak atau jatuh tempo dilakukan secara bertahap-tahap. Namun peneliti mendapatkan dari wawancara dengan wajib pajak mengatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa penyampaian surat paksa belum dilakukan. Sehingga tidak bisa dilanjutkan ke sanksi-sanksi tahapan berikutnya. Jadi disini peneliti mengambil dugaan sementara bahwa sanksi belum diterapkan sebagaimana aturan yang ada.

Selain itu hal tersebut akan sangat membebani pihak kecamatan selaku pemungut dan pengelola pajak daerah, mengingat bukan hanya PBB yang menjadi tugas mereka. Masih ada 10 jenis pajak kabupaten/kota lain, yang harus ditangani dengan jumlah personil yang sangat terbatas hanya 1 (satu) pada setiap desa.

Dari hal diatas adapun gejala permasalahan yang tampak oleh peneliti yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam memberikan informasi kepada wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berakibat pada ketidakpahaman wajib pajak dan melalaikan kewajibannya dalam melunasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ;

Kurangnya sumber daya manusia (staf) yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai kolektor/juru pungut PBB-P2, yakni hanya menunjuk 1 (satu) orang petugas lapangan untuk satu kelurahan/desa dalam waktu yang relatif singkat sehingga dirasa kurang efektif untuk dilaksanakan. Belum diterapkan sepenuhnya sanksi yang ada. Hal tersebut diatur dalam Perda No 1 Tahun 2013 Pasal 13 sampai 20 menjelaskan tentang sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar ataupun menunggak pajak PBB-P2 nya.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”.

1. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Insentif Pemungutan?
- 2) Apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Pangean agar dapat berjalan efektif ?

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Insentif Pemungutan.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Pangean agar dapat berjalan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan dibidang kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bahan masukan untuk pegawai Bapenda dalam menjalankan tugasnya yang terkait dengan Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam proposal ini di bagi atas tiga pokok bahasan (bab) dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab, seperti berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam tentang pajak bumi dan bangunan, definisi konsep konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi sejarah singkat tempat melakukan penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak.

Menurut James E. Anderson dalam M. Irfan Islamy (2003 : 17) merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dan Amara Raksasataya mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Edi Suharto (2005 : 7) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Ealau dan Pewitt mengemukakan kabijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dengan demikian kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengertian publik menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam Wirman Syafri (2012 : 15) mengatakan publik adalah kelompok individu yang terkait oleh kepentingan bersama dan berbagai rasa atas dasar kebersamaan. Sedangkan, pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih berbagai macam pendapat dari para ahli.

Selanjutnya terdapat juga pendapat dari Thomas R.Dye dalam Winarno (2007 : 17) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is what ever goverment chose to do or not to do”* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan pemerintah.

George C.Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu *“.....is what goverment say do or not to do, it is goals or purpuses of goverment*

program...””(....adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran dan tujuan program-program pemerintah..). Namun, kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, ataupun program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Suharno (2013 : 5) memberi penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan-tindakan. Kata ‘publik’ dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti Negara-sistem politik serta administrasi. Sementara ‘pemerintah’ adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandate oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem-bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, Negara hingga supra Negara (ASEAN, EU) dan dunia (WHO, PBB).

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Dalam perannya untuk memecahkan masalah, Dunn dalam Winarno (2007 : 33) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan permasalahan publik melalui kebijakan adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyusunan agenda;
- 2) Formulasi kebijakan;
- 3) Adopsi kebijakan;
- 4) Implementasi kebijakan;
- 5) Evaluasi kebijakan;

Menurut Solichin (2012: 18) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public authorities*) dalam sistem politik. Dalam sistem politik/ masyarakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya pak ketua adat atau ketua suku. Sedangkan sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, dan sejenisnya. Mereka inilah, masih menurut pendapat Easton, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik dari sistem politik, dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi.

2.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penetapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Repley dan Franklin dalam Winarno (2007 : 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Proses implemetasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah diciptakan dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam memuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut bertujuan dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

Sebagaimana telah dikatakan oleh para pakar, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan

politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung atau tidak berlangsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif.

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah “ semakin tinggi derajat kesesuiannya maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan”.

Menurut Grindle dalam Winarno (2007 : 146) memberikan pandangan terhadap implementasi dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Teori Implementasi kebijakan Googre C. Edward III dalam Winarno (2007 : 208) dalam pandangan, implemenatasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumber-Sumber;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

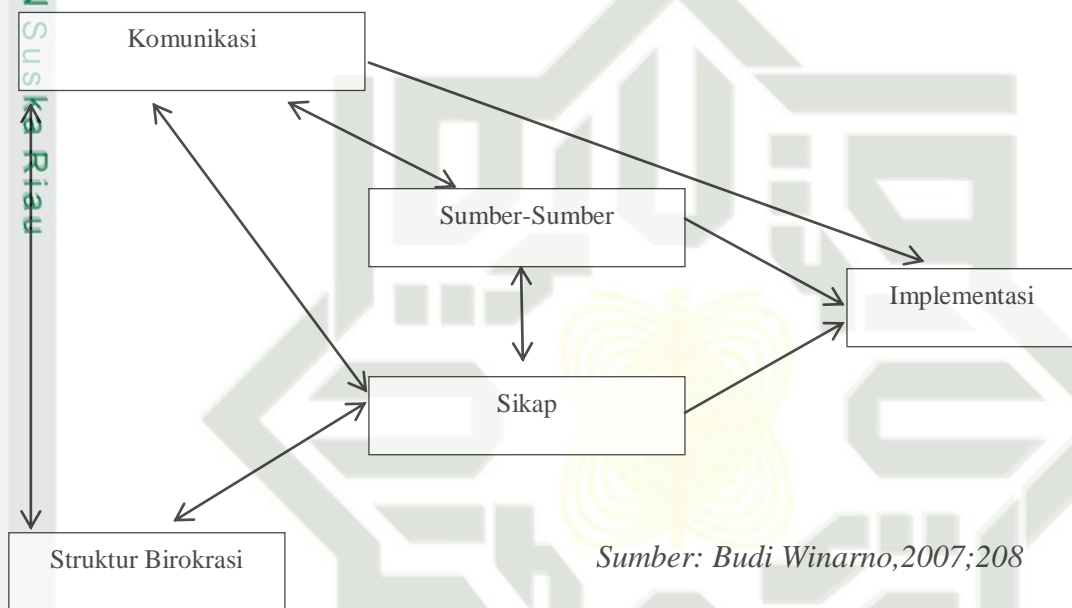
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kecenderungan-Kecenderungan atau tingkah laku;
- 4) Struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana di gambarkan berikut ini:

Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut G.C Edward III



Sumber: Budi Winarno, 2007; 208

Dari bagan diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Variabel komunikasi yaitu, proses informasi mengenai kebijakan dari pelaksana tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat bawahannya;
- 2) Variabel sumber-sumber termasuk manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;
- 3) Variabel disposisi (sikap) maksudnya kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana;
- 4) Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagaimana tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

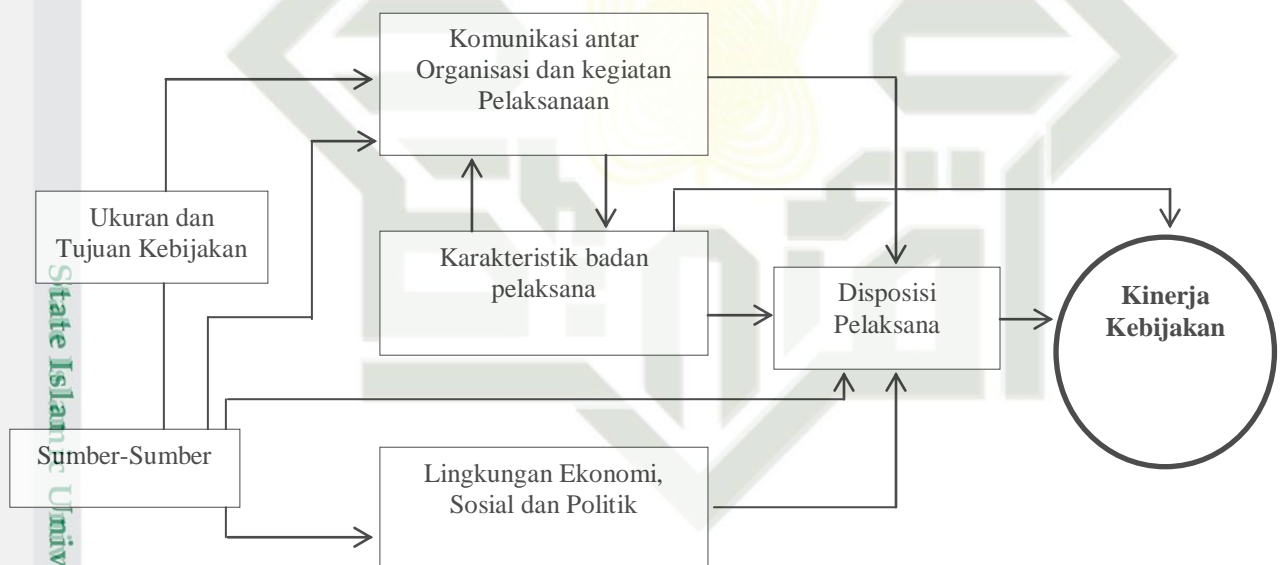
Adapun menurut van Metter dan Van Horn dalam Winarno (2007 : 157)

menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan;
- 2) Sumber-Sumber;
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- 4) Karakteristik badan pelaksana;
- 5) Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn



Sumber: Budi Winarno, 2007; 157

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi di atas, penulis mengartikan implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan dan dibuat serta disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga dapat disimpulkan bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sikap pelaksana, sumber-sumber, komunikasi, struktur birokrasi, lingkungan dan standar serta sasaran.

1) Komunikasi

Komunikasi Veithzal dkk (2009 : 336) mengatakan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Selain itu, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi pengiriman dari seseorang kepada orang lain. Delapan unsur pokok di dalam proses komunikasi Veithzal (2009 : 336), sebagai berikut:

- 1) Pengirim/sumber adalah orang yang mempunyai ide untuk mengadakan komunikasi;
- 2) *Encoding* adalah menerjemahkan informasi menjadi serangkaian simbol untuk komunikasi;
- 3) *Message* (pesan) adalah informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Channel* (Saluran) adalah media komunikasi formal antara seseorang pengirim dan seorang penerima;
- Receiver* (penerima) adalah individu yang menanggapi pesan dari pengirim
- Decoding* (pengertian) adalah interpretasi suatu pesan menjadi informasi yang berarti;
- Noice* (gangguan) adalah faktor yang menimbulkan gangguan, kebingungan terhadap komunikasi;
- Umpan balik adalah balikan dari proses komunikasi sebagai suatu reaksi terhadap informasi yang disampaikan oleh pengirim.

Ada tiga unsur pokok yang dipergunakan untuk mengidentifikasi komunikasi yang relevan dengan ilmu perilaku organisasi Veithzal (2009 : 337), yaitu:

- Sifat informasi, yang dipengaruhi oleh banyak informasi.

Dalam informasi ini terdapat tujuh reaksi terhadap kelebihan muatan informasi: (1) gagal dalam memperhitungkan informasi; (2) banyak membuat kesalahan; (3) menunda pekerjaan; (4) penyaringan; (5) cenderung menangkap informasi pada garis besarnya saja; (6) menugaskan tugas kepada orang lain untuk menghadapi kelebihan beban informasi; (7) kesenjangan untuk menghindari informasi yang datang.

- Komunikasi organisasi.

Komunikasi menduduki suatu tempat suatu tempat yang utama karena susunan keluasaan dan cakupan organisasi secara keseluruhan ditentukan oleh teknik komunikasi. Dari sudut pandang ini komunikasi adalah suatu proses sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai relevansi terluas didalam memfungsikan setiap kelompok, organisasi, atau masyarakat. Proses komunikasi dalam struktur formal tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dimensi vertikal, horizotal luar organisasi dan begitu pula sebaliknya. Dimensi horizontal adalah penerimaan atau pengiriman berita atau informasi yang dilakukan antar pejabat yang mempunyai kedudukan yang sama. Sedang dimensi luar organisasi adalah dimensi komunikasi yang timbul sebagai akibat dari suatu organisasi yang tidak bisa hidup sendiri, ia merupakan bagaian dari lingkungannya.

c. Komunikasi Antar pribadi

Komunikasi antar pribadi berorientasi pada perilaku hingga penekanannya sampai proses informasi, dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi antarpribadi bisa efektif bila memperhatikan: 1). Keterbukaan bagi setiap orang untuk berinteraksi; 2). Empty, mencoba merasakan dalam cara yang sama dengan orang lain; 3). Ada dukungan dengan orang lian 4) perhatian positif dikomunikasikan; 5). Ada kesamaan di antara orang yang berkomunikasi;

Dari uraian diatas, maka komunikasi merupakan proses penting dalam wadah organisasi atau lembaga. Jika seorang pemimpin berhasil dalam berkomunikasi, merupakan jaminan kesuksesan dalam usaha pencapaian tujuan. Hal itu senada dengan pendapat George C . Edward dalam Winarno (2007 : 175) yang menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, komunikasi dan kejelasan (clarity).

Faktor pertama, yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Maksudnya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan, ia harus menyadari bahwa keputusan yang telah dibuat. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam komunikasi seperti; salah pengertian (*miskomunikasi*) hal tersebut disebabkan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Faktor kedua, yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan. Maksudnya jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidaktepatan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal.

Faktor ketiga, yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi. Maksudnya jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan yang diberikan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan), karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dan lapangan. Dikaitkan dengan penelitian implementasi Kebijakan PBB-P2 ini, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah:

- 1) Transmisi sosialisasi kebijakan PBB-P2;
- 2) Kejelasan komunikasi kebijakan PBB-P2 dari para pelaksana;
- 3) Konsistensi perintah-perintah kebijakan PBB-P2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber-Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang terpenting dalam melaksanakan kebijakan publik Winarno (2007 : 181). Winarno juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.

Staf, merupakan sumber paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurang kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah atau staf, namun di sisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi staf yang mempunyai keterampilan yang memadai dengan jumlah yang cukup akan mempermudah pelaksanaan kebijakan.

Informasi, informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Seperti telah dibahas dalam aspek terdahulu, yakni menyangkut faktor

komunikasi, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan akan menghambat keberhasilan implementasi. *Bentuk kedua*, dari informasi adalah data tentang ketaatan personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-undang atau tidak.

Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung. *Pertama*, beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya. *Kedua*, ketidakefesiensian. *Wewenang*, sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti; hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengajukan masalah-masalah ke pengadilan dll. Namun demikian, dalam beberapa hal suatu badan wewenang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat.

Menurut Lindblom dalam Winarno (2007 : 187) menyatakan bahwa untuk dapat memahami dengan baik mengenai kewenangan maka perlu untuk mengetahui 2 jalur berikut; *Jalur pertama*, setiap kali bila seseorang ingin melakukan berbagai kontrol (antara lain persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang akan dikontrol. Pada *jalur kedua*, pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja menggunakan metode-metode membujuk orang-orang yang dikontrolnya agar menaati peraturan yang ada bahwa mereka harus tunduk kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fasilitas, fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melaksanakan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar pula kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang akan dilihat dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan PBB-P2 adalah:

- 1) Kemampuan sumber daya manusia pelaksana PBB-P2;
- 2) Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan PBB-P2.

3) Disposisi (sikap dari pelaksana kebijakan)

Sikap Veithzal (2009 : 245) adalah suatu kesiapan untuk menanggapi, suatu kerangka yang utuh untuk menetapkan keyakinan atau pendapat yang khas serta sikap juga pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Bila seseorang mengatakan “*saya menyukai pekerjaan saya*”, maka orang itu akan mengungkapkan sikapnya mengenai kerja.

Sumber sikap sama seperti nilai, yaitu diperoleh dari orang tua, guru dan anggota kelompok rekan sekerja. Manusia pada dasarnya dilahirkan dengan kecenderungan (*predisposisi*) genetik tertentu. Kemudian dalam tahun-tahun dini, dimulai memodelkan sikap diri sendiri menurut sikap orang yang dikagumi, informati, atau bahkan yang ditakuti. Seseorang dapat mempunyai ribuan sikap,

atau dalam hal ini terbatas pada yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam hal ini, ada tiga sikap yang sangat mempengaruhi terhadap suatu pekerjaan, yaitu;

- 1) Kepuasan kerja (*job satisfaction*) merujuk pada sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap positif terhadap kerja dan begitu pula sebaliknya.
- 2) Keterlibatan kerja (*job involvement*) yang mengukur derajat sejauh mana seseorang memihak secara psikologi pada pekerjaannya dan menganggap tingkat kinerjanya yang dipresepsikan sebagai penting untuk harga diri. Tingkat keterlibatan kerja yang tinggi telah ditemukan berkaitan dengan kemahiran yang rendah dan tingkat permohonan berhenti yang lebih rendah.
- 3) Komitmen pada organisasi. Itu didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti memihakkan seseorang pada pekerjaannya yang khusus; komitmen pada organisasi yang tinggi berarti memihakkan pada organisasi yang mempekerjakannya.

Disposisi dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dikaitkan dengan penelitian ini maka fenomena yang digunakan untuk mengukur sikap adalah:

- 1) Presepsi pelaksana terhadap kebijakan PBB-P2;
- 2) Respon pelaksana kebijakan PBB-P2;
- 3) Tindakan pelaksanaan kebijakan PBB-P2.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi publik. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dikaitkan dengan struktur birokrasi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi. Ini sesuai dengan pendapat Edwards dalam Winarno (2007 : 202) menyatakan bahwa birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007 : 202) terdapat enam karakteristik birokrasi, yakni; *pertama*, birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrumen yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang berurusan dengan publik. *Kedua*, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan. *Ketiga*, birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. *Keempat*, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. *Kelima*, birokrasi jarang mati. Dan *keenam*, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan yang berasal dari luar.

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik, kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antar instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksana dilapangan. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah:

- 1) Pembentukan struktur organisasi;
- 2) Pembagian tugas;
- 3) Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lingkungan

Suharno (2013 : 173) menyatakan bahwa lingkungan implementasi kebijakan mencakup tiga aspek berikut ini:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa;
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada diluar organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan pemerintah, kelompok publik penekan dan semacamnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama lingkungan organisasi, yaitu kapasitas, volatilitas, dan kompleksitas.

Sejalan dengan ungkapan diatas Van Metter dan Van Horn juga mengatakan bahwa lingkungan ekonomi, sosial, politik dari yuridiski atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana, kecendrungan-kecendrungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri.

Kapasitas lingkugan mengacu sampai tingkat mana lingkungan itu mendukung adanya pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menimbulkan sumber daya yang berlebihan, sehingga dapat menyangga organisasi pada saat kelangkaan relatif. Kapasitas yang berlebihan dapat memberikan kesempatan bagi sebuah organisasi membuat kesalahan, sedangkan kapasitas yang langka tidak menolerir adanya kesalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat ketidakstabilan lingkungan dimasukan dalam dimensi volatil itu.

Jika terdapat tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi, lingkungan tersebut adalah dinamis. Hal ini menyukarkan manajemen untuk meramalkan secara tepat kemungkinan yang terkait dengan berbagai alternatif keputusan. Pada sisi lain terdapat sebuah lingkungan yang stabil.

Pada akhirnya, lingkungan harus dinilai dalam hubungannya dengan kompleksitas, artinya tingkat dari heterogenitas dan konsentrasi adalah homogen dan terkonsentrasi. Sebaliknya lingkungan yang heterogenitas dan penyebaran disebut lingkungan yang kompleks.

6) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut van Metter dan Van Horn Winarno (2007 : 156), identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Metter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada dua penyebab untuk menjawab hal ini, yaitu pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak

© Hak Cipta: milik UIN Suska Riau
Statistik Islamik University of Sultan Syarif Kasim Riau
dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2.4 Insentif Pemungutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja dan uang perangsang.

Pengertian Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Prinsip pemberian insentif ini berhubungan dengan kinerja karyawan yang melampaui standar yang telah ditetapkan perusahaan. Atas kerja keras dan prestasi kerja tersebut maka karyawan akan mendapatkan penghargaan, bisa dalam bentuk uang, barang, dan

lainnya. Pemberian insentif ini umumnya diberikan kepada tenaga pemasaran yang berhasil menjual melebihi target perusahaan. Contohnya, seorang sales yang menjual lebih banyak dari target penjualan.

Sesuai dengan penjelasan definisi insentif di atas, kompensasi dalam bentuk insentif sangat erat hubungannya dengan motivasi kerja. Jadi, insentif diberikan berdasarkan prestasi atau produksi dari seorang pekerja. Berikut ini adalah tujuan pemberian insentif:

a. Tujuan Insentif Bagi Perusahaan

Dari sisi perusahaan, memberikan insentif kepada pekerja bertujuan untuk:

- a) Menjaga loyalitas para pekerja berkualitas;
- b) Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja, dimana hal ini akan terlihat dari absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja;
- c) Meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan kata lain hasil produksi bertambah untuk setiap unit per satuan waktu, serta meningkatnya penjualan

b. Tujuan Insentif Bagi Karyawan

Dari sisi karyawan, tujuan pemberian insentif adalah:

- a) Memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya pendapatan tambahan selain gaji pokok;
- b) Memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi di tempat kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-Jenis Insentif

Macam-macam insentif dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dan berdasarkan penerimanya.

a) Jenis Insentif Berdasarkan Bentuknya

Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu: Insentif material; yaitu insentif yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, dan jaminan hari tua. Insentif non-material; yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam penghargaan, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, pujian dalam bentuk tulisan dan lisan.

b) Jenis Insentif Berdasarkan Penerimaannya

Jenis insentif ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu: *Individual incentive*; yaitu insentif yang diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. *Group incentive*; yaitu pemberian insentif kepada pegawai sesuai dengan standar dari masing-masing group/kelompok. *Plant-wide incentive*; yaitu pemberian insentif kepada semua pegawai perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan.

d) Bentuk-Bentuk Insentif

Seperti yang disebutkan pada pengertian insentif di atas, pemberian insentif dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Menurut Koontz pemberian insentif bisa dalam bentuk uang, partisipasi, dan lingkungan kerja yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Insentif Dalam Bentuk Uang

Pada umumnya para pegawai lebih memilih menerima insentif dalam bentuk uang. Hal ini berkaitan dengan realisasi kualitas kehidupan pegawai yang lebih baik dari sisi keuangan. Dengan prestasi kerja yang baik akan mendukung kesempatan mendapatkan insentif dari perusahaan. Dengan begitu maka kebutuhan hidup pegawai tersebut terpenuhi dan menjadi lebih baik.

b) Insentif Berbentuk Lingkungan Kerja yang Baik

Lingkungan kerja yang baik merupakan salah satu impian dari para pekerja. Alasannya, dengan lingkungan kerja yang baik maka hal ini akan mendukung kenyamanan dalam bekerja dan peningkatan prestasi kerja.

c) Insentif Dalam Bentuk Partisipasi

Kesempatan untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dengan petinggi di perusahaan bisa memberikan dorongan semangat kerja kepada para pekerja. Dengan kesempatan seperti ini, maka karir seorang pegawai dapat meningkat lebih cepat sesuai dengan kinerjanya. Selain itu, dengan adanya kesempatan menjadi partisipasi maka seorang pegawai mendapatkan pengakuan dan mendapat dukungan dari perusahaan.

e) Indikator Pemberian Insentif

Dalam pemberian insentif, tentu saja perusahaan tidak melakukannya begitu saja. Pada umumnya, ada beberapa indikator pemberian insentif, yaitu:

a) Kinerja Pegawai

Pegawai yang berprestasi atau yang menunjukkan kinerja di atas rata-rata biasanya selalu mendapatkan insentif dari perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Waktu Kerja Pegawai

Seperti kata pepatah, waktu adalah uang. Insentif yang diterima oleh pegawai juga dapat ditentukan oleh waktu kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

c) Senioritas Karyawan

Masa kerja seorang karyawan di sebuah perusahaan juga berpengaruh kepada besarnya insentif yang akan diterimanya.

d) Kebutuhan Pegawai

Pemberian insentif kepada pegawai dapat juga didasarkan kepada tingkat urgensi kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik dari pegawai.

e) Keadilan dan Kelayakan

Perusahaan juga sering memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan pengorbanan kerja yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut.

f) Evaluasi Jabatan Karyawan

Tingkat jabatan seorang karyawan juga menjadi salah satu indikator penting dalam pemberian insentif.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2.1 Pengertian

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.5.2 Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 2

- (1) Dengan nama PBB Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan;
- (2) Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan;
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - i. Menara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki dan/atau menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau Bangunan;
- (2) Wajib PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki dan/atau menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau Bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 4

- (1) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak;
- (2) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud;
- (3) Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan Penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud;
- (4) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan-alasannya;
- (5) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Pasal 5

Besarnya NJOP TKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) 0,1 % (nol koma satu persen) : untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (2) 0,2 % (nol koma dua persen) : untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- (3) 0,3 % (nol koma tiga persen) : untuk NJOP diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP;
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Besaran pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

selah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

$$\text{Pajak Bumi dan Bangunan} = \text{NJOP} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.4 Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender.

Pasal 10

- (1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajak;
- (3) Berdasarkan formulir pendaftaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak;
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan pendataan wajib pajak baru maupun Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD;
- (5) Pendataan PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan SPOP.
- (6) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

2.5 Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak

Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan;
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dibayar berdasarkan SPPT.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- (2) Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajak;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT atau STPD;
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati;
- (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

25.7 Tata Cara Penagihan

Pasal 15

- (1) SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak;
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa;

- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 18

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.5.8 Insentif Pemungutan

Pasal 31

- (1) Pemungut Pajak pada SKPD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. Pendapatan daerah;
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 32

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis pajak.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang berkenaan.

2.5.9 Pelaksana

Pasal 34

Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyeteran, pembukuan, dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan.

Pasal 35

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikoordinasikan dengan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal 36

Tata cara dan formulir Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyeteran, pembukuan, dan pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 37

Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan PBB Perdeaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh SKPD yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.6 Pandangan Islam Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan *adh-Dharibah* yang jama'nya adalah *adh-Dharaib*. Para ulama dahulu menyebutnya juga dengan istilah *al-Muks*. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak, di antaranya adalah : *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam), *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara), *al-Usyr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).

Kharaj merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum Muslim yang dibiarkan tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya atau secara singkat dapat dikatakan kharaj adalah pajak negara yang diambil dari pemilik tanah. Dalam ekonomi konvensional *kharaj* ini dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemungutan kharaj terhadap setiap lahan pertanian tidak sama karena jumlah pajak setiap lahan ditentukan kualitas tanah dan kemampuan dalam menanggung pajak. Pemungutan kharaj pada masa Rasulullah bersifat tidak tetap tergantung pada jenis tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Rasul memungut pajak kebun anggur dan kebun kurma jumlahnya lebih besar dari lahan gandum. Pada masa Umar pun pemungutan kharaj didasarkan pada tingkat kesuburan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, lokasi, dan lingkungan tempat tanah itu berada. Dengan demikian ada tiga faktor yang diperhatikan dalam pemungutan kharaj, yaitu:

- 1) Karakteristik kesuburan tanah. Tanah yang subur akan dapat menghasilkan tanaman yang baik dan dengan jumlah yang besar, sebaliknya tanah yang tidak subur sulit untuk diolah dan menghasilkan tanaman yang baik.
- 2) Karakteristik jenis tanaman yang dihasilkan baik dari segi jumlah yang dihasilkan maupun dari segi kualitas tanamannya. Hal ini berkaitan erat dengan mutu dan daya jual tanaman yang dihasilkan.
- 3) Karakteristik jenis pengairan. Pengairan ini terbagi atas empat kategori, yaitu tanah yang diairi oleh sungai maupun mata air, tanah yang diairi tenaga manusia maupun hewan, tanah yang diairi oleh air hujan dan tanah yang tidak membutuhkan pengairan dan kesuburannya didapatkan secara alamiah. Untuk setiap kategori pengairan tersebut akan berbeda beban kharajnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem irigasilah yang paling utama untuk diperhatikan dalam menetapkan tarif kharaj sedangkan faktor kualitas tanah dan jenis tanaman merupakan faktor terakhir.

Dalam melakukan pemungutan kharaj bisa dilakukan dengan dua cara yaitu kharaj *muqassimah* (perbandingan) dan kharaj *wazhifah* (tetap). Kharaj *muqassimah* dilakukan berdasarkan hasil tanah misalnya seperdua atau sepertiga dari hasil tanaman yang dipungut pada setiap kali panen. Sedangkan kharaj *wazhifah* yaitu beban khusus yang diberikan pada lahan pertanian sebanyak hasil panen atau persatuan lahan yang kewajibannya dikenakan setelah lewat satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

”Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No : 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun).

Yang dimaksud kewajiban selain zakat dalam hadist tersebut adalah kewajiban sosial lainnya yaitu berupa pajak, sedekah sunnah, infaq, hibah dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan pemanfaatannya, tetapi juga mengajurkan membayar pajak, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan sangat fleksibel.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
	Reza Gustiana (Skripsi UIN SUSKA RIAU 2016)	Implementasi Perda Kabupaten Inhil Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kecamatan Keritang).	Walaupun peraturan daerah telah dikeluarkan tapi masih timbul permasalahan dalam pelaksanaannya. Selain itu pemerintah daerah belum maksimal mengadakan penyuluhan atau sosialisasi peraturan daerah dan tingkat pelayanan masih kurang ditambah lagi penerapan sanksi yang tidak pernah dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			hanya berupa denda atau teguran.
	Margot Siregar (Skripsi UIN SUSKA RIAU 2013)	Implementasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu nomor 4 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)	Pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Tingkok belum maksimal. Dikarenakan Dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3	Supik Atun (Skripsi UNRI 2016)	Implementasi Perda. No.1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	Hasil analisis bahwa Perda. No.1 Tahun 2013 Tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi dengan baik hal ini dikarenakan masih kurangnya biaya transportasi, pendataan ulang wajib pajak yang belum efektif, begitu juga dengan penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa serta penetapan target belum sesuai dengan kondisi riil.

Konsep Operasional Penelitian

Tabel 2. 2 Konsep Operasional Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Pangean) Menurut Model Implementasi George C. Edwards III dan Perda. Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013.	Komunikasi	1. Transmisi sosialisasi kebijakan PBB-P2 2. Kejelasan komunikasi kebijakan PBB-P2 3. Konsistensi perintah kebijakan PBB-P2
	Sumber Daya	1. Kemampuan sumber daya manusia pelaksana PBB-P2 2. Penyediaan fasilitas yang mendukung kebijakan PBB-P2
	Disposisi	1. Presepsi pelaksana terhadap kebijakan PBB-P2 2. Respon pelaksana kebijakan PBB-P2 3. Tindakan pelaksanaan kebijakan PBB-P2
	Struktur Birokrasi	1. Pembentukan struktur organisasi 2. Pembagian tugas 3. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan
	Insentif Pemungutan	1. Pemberian insentif apabila mencapai target 2. Meningkatkan kinerja pegawai 3. Insentif berasal dari APBD
	Faktor penghambat	1. Geografis 2. Jangkauan Pengawasan

Sumber: George C. Edwards III (Budi Winarno, 2007) dan Perda Kab. Kuansing No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

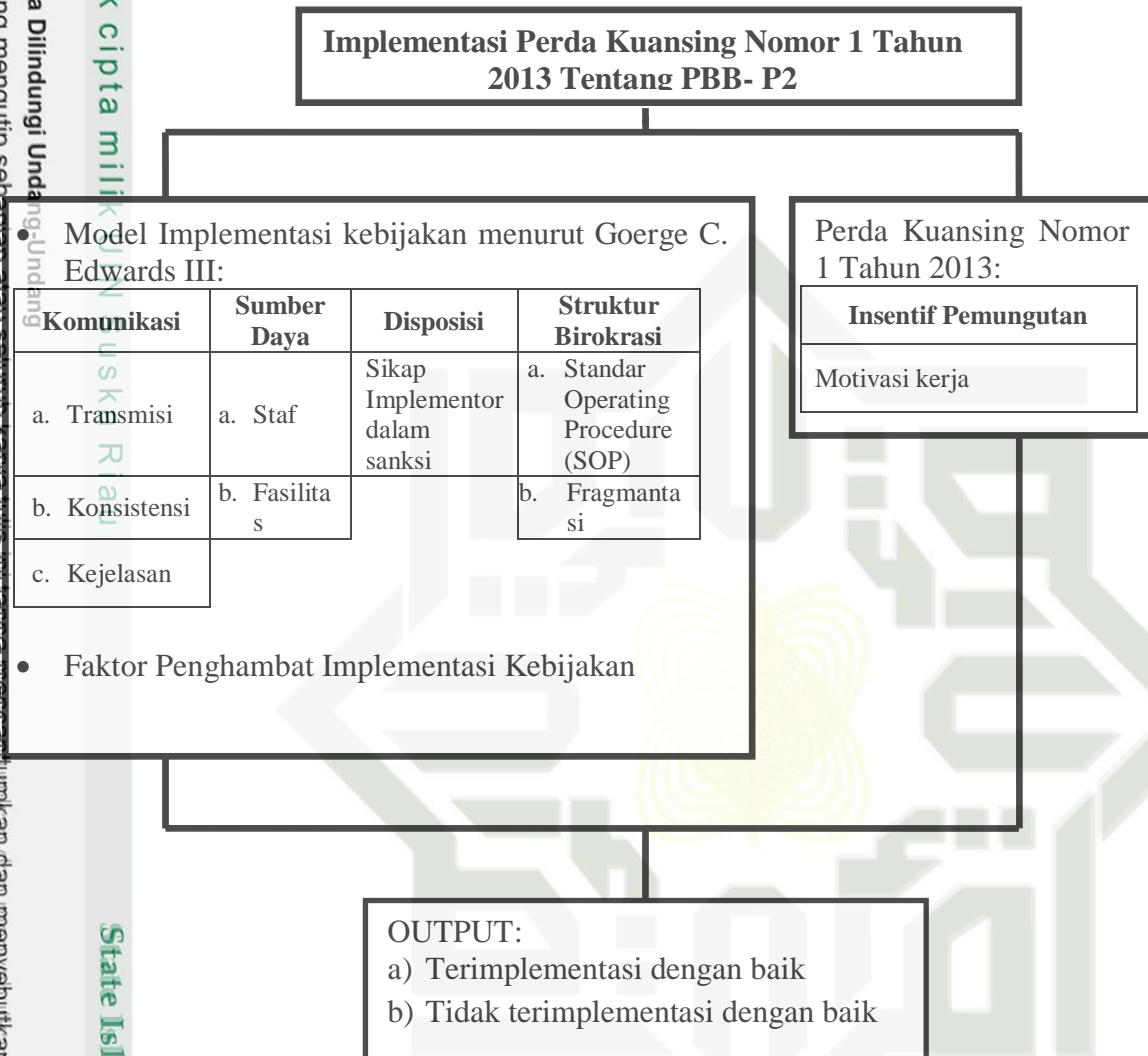
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Implementasi kebijakan merupakan suatu cara bagaimana sebuah kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Untuk itu, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Studi kasus di Kecamatan Pangean dan apa faktor-faktor penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Studi kasus di Kecamatan Pangean. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berpikir penelitian sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis, diadopsi dari George C. Edwards III (Budi Winarno, 2007) dan Perda Kab. Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004 : 11) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa Implementasi Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, lokasi penelitian adalah di Kecamatan Pangean, kabupaten Kuantan Singingi tepatnya dikantor Kecamatan Pangean dan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kuantan Singingi serta beberapa masyarakat yang merupakan wajib Pajak yang ada dikecamatan Pangean.

Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari sampai dengan Maret 2018. Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis, sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian dan juga karena penulis ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Jenis dan Sumber Data

3.1 Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah- masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, Baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini diperoleh dari :

- 1) Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).
- 2) Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Pangean dan Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi serta beberapa masyarakat yang merupakan wajib Pajak yang ada dikecamatan Pangean.

3.2 Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan. yaitu data berupa dokumen tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dan buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Observasi

Yakni teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Observasi ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi baik instansi maupun Masyarakat. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar yaitu dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dengan tahap observasinya dimulai dari tahap memasuki situasi sosial kemudian dilanjutkan dengan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci.

2) Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Badan, Bidang, dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

3.2 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti memilih informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan adalah berjumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jumlah
1	Kepala Bapenda	1
2	Kabid. Pendataan dan Penetapan serta staf	3
3	Kabid. Penagihan serta staff	3
4	UPTD/ Kas Daerah	1
5	Kepala Kecamatan Pangean	1
6	Wajib Pajak	6
Jumlah		15

Sumber: BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

3.2.1 Kriteria Informan penelitian

Adapun yang peneliti jadikan sebagai *Informan* adalah *Subjack* ataupun individu masyarakat serta lembaga yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri- cirinya antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berada didaerah yang diteliti;
- 2) Mengetahui kejadian / permasalahan;
- 3) Bisa berargumentasi dengan baik;
- 4) Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan;
- 5) Terlibat langsung dengan Permasalahan.

Analisa Data

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data Kualitatif Deskriptif data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005 : 60). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data:

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengupulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada upaya pemerintah dalam implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

2) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berkenaan dengan implementasi peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan tersebut, serta mengaitkan dengan teori George C. Edwards dan peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 1 tahun 2013, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul Perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala elok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, Perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0⁰⁰ -1⁰ 00 Lintang Selatan dan 101⁰ 02 - 101⁰ 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi

Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas - batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada. Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 12 kecamatan sebelum adanya Peraturan Daerah 24 tahun 2012 yang berdasarkan peraturan tersebut adanya pemekaran dan sekarang menjadi 15 kecamatan dengan tiga kecamatan terbaru yaitu Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pucuk Rantau dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama-Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Hulu Kuantan	11 Desa
2	Kecamatan Kuantan Mudik	23 Desa
3	Kecamatan Gunung Toar	12 Desa
4	Kecamatan Kuantan Tengah	20 Desa
5	Kecamatan Benai	22 Desa
6	Kecamatan Pangean	17 Desa
7	Kecamatan Kuantan Hilir	9 Desa
8	Kecamatan Inuman	9 Desa
9	Kecamatan Cerenti	9 Desa
10	Kecamatan Singingi	12 Desa
11	Kecamatan Logas Tanah Darat	13 Desa
12	Kecamatan Sentajo Raya	15 Desa
13	Kecamatan Kuantan Hilir Seberang	14 Desa
14	Kecamatan Singingi Hilir	12 Desa
15	Kecamatan Pucuk Rantau	10 Desa
Jumlah		208 Desa

Sumber data: <http://www.kuansing.go.id>

Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan atau Sungai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budidaya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Kuantan mengalir 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman, dan Kecamatan Cerenti. (sumber: <http://www.kuansing.go.id>)

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.2.1 Kecamatan Pangean

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pangean yang mempunyai jumlah penduduk 20.718 jiwa dengan luas wilayah 145,32 Km² dan terdiri dari 17 Desa (tahun 2014). Ibukota kecamatan pangean adalah Pasarbaru. Jarak ibukota Kecamatan Pangean ke Ibukota Kabupaten adalah lebih kurang 31 km. Batas-batas wilayah kecamatan Pangean:

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan hilir

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai dan

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat

Kecamatan Pangean dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dan kepala desa, yang semuanya bekerja sesuai dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Pangean

No.	NAMA/NIP	JABATAN
1	Mahviyen Trikon Putra, SE/19771003 200012 1 002	Camat
2	Irhandi, S.Sos/19710220 200012 1 001	Sekretaris Camat
3	Ferawati, S.Sos/19811212 200801 2 021	Kasubbag. Program
4	Eddra Mandahris, S.Sos/19800606 200012 1 002	Kasubbag. Keuangan
5	Mhd. Yusuf, SE/19740405 200501 1 013	Kasubbag. Umum
6	Teliur, A.Md/19661230 198702 1 008	Kasi Pemerintahan
7	Hendri Putra Utama/19570101 198903 1 010	Kasi Trantib
8	Murhalim/19631231 198603 1 146	Kasi PMD

Tabel 4. 3 Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangean

No.	Nama-Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Pasar Baru Pangean	4.330 Jiwa
2	Pulau Tengah	527 Jiwa
3	Pulau Kumpai	1.386 Jiwa
4	Padang Tanggung	383 Jiwa
5	Pulau Deras	892 Jiwa
6	Teluk Pauh	440 Jiwa
7	Padang Kunyit	705 Jiwa
8	Pembatang	1.202 Jiwa
9	Pulau Rengas	688 Jiwa
10	Sukaping	653 Jiwa
11	Sako	2.146 Jiwa
12	Pauh Angit	1.220 Jiwa
13	Tanah Bekali	1.186 Jiwa
14	Koto Pangean	389 Jiwa
15	Pauh Angit Hulu	1.139 Jiwa
16	Sungai Langsung	2.883 Jiwa
17	Rawang Binjai	476 Jiwa

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Pangean dihuni oleh 20.615 penduduk atau 5.604 KK yang terdiri dari 10.036 laki-laki dan 10.569 perempuan. Dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	10.036 Jiwa	49,1 %
	Perempuan	10.569 Jiwa	50,9 %
	Jumlah	20.605 Jiwa	100 %

Sumber: Kantor Camat Pangean

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan penduduk Kecamatan Pangean lebih banyak kaum perempuan yaitu sebanyak 10.565 jiwa atau 50,9 % dan laki-laki sebanyak 10.153 jiwa atau 49,1 %. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) yaitu 5.216 kepala keluarga.

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. Khususnya Kecamatan Pangean yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk bertani dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Kecamatan Pangean yang menjadi petani baik dan berkebun.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat kecamatan Pangean mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat. Masyarakat Pangean mempunyai mata pencaharian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beraneka ragam seperti; petani, pedagang, karyawan industri, PNS, TNI/POLRI, peternak, sopir, tukang jahit, wiraswasta, nelayan, pertukangan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Mata Pencarian

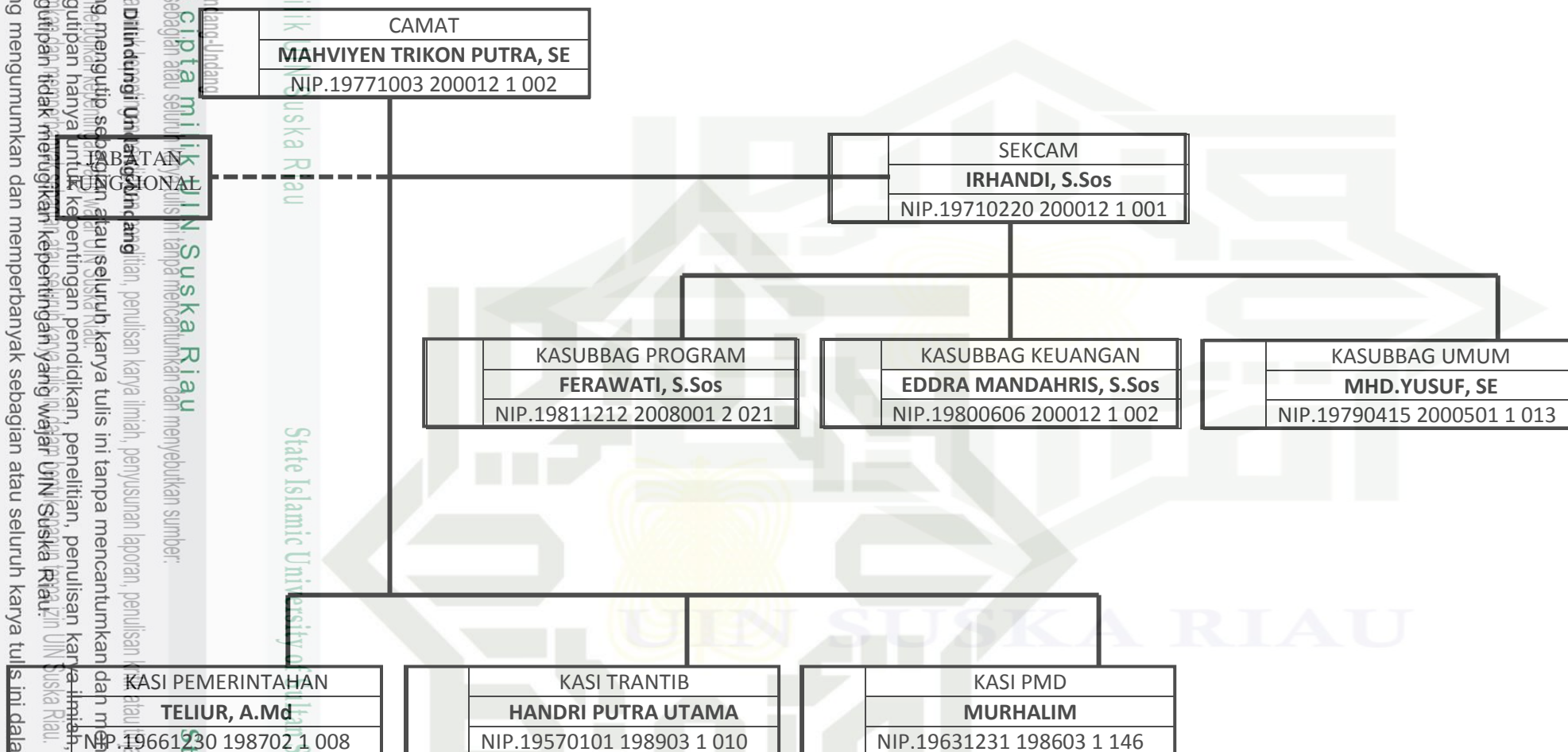
No.	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	903	17,3 %
2	Perkebunan	1.134	21,7 %
3	Pedagang	447	8,5 %
4	Peternak	89	1,7 %
5	Karyawan Industri	430	8,2 %
6	Guru	219	4,2 %
7	PNS	308	6,0 %
8	TNI/POLRI	48	0,9 %
9	Wiraswasta	641	12,3 %
10	Buruh	210	4,0 %
11	Sopir	53	1,0 %
12	Penjahit	56	1,1 %
13	Nelayan	42	0,8 %
14	Pensiunan	51	1,0 %
15	Tukang	97	1,9 %
16	Lainnya	488	9,4 %
Jumlah		5.216	100 %

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Pangean

Maka berdasarkan tabel di atas bahwa mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Pangean yaitu perkebunan dimana banyaknya kebun sawit dan pohon karet di kecamatan Pangean.

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Pangean





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Badan Pendapatan Daerah

Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran

a. Visi

Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan suatu Visi sebagai komitmen bersama dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan. Visi yang tepat akan mampu menjadi ekselerator kegiatan organisasi, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kerja.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana Instansi pemerintah dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi pemerintah. Berdasarkan pemikiran diatas, maka Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

“ Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat pengelola yang ramah, Profesional dan inovatif ”.

Penjelasan Visi diatas sebagai berikut :

- a) Optimalisasi Pendapatan Daerah, upaya terbaik atau menguntungkan dalam melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi, sehingga dalam perencanaan dan realisasi target sesuai dengan peluang dan potensi daerah.
- b) Ramah adalah, sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak.

- c) Profesional adalah, aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yang di dukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah.
- d) Inovatif adalah, Aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dan penemuan baru dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, khususnya dalam melakukan intensifikasi dan Ekstensifikasi Daerah.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas, Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan misi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi;
- b) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi;
- c) Meningkatkan pelaksanaan system dan prosedur Pendapatan Daerah;
- d) Meningkatkan produktivitas kerja pegawai

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk operasional yang terarah berupa tujuan dan sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan

- a) Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah;
- b) Meningkatnya Pendapatan Daerah;
- c) Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak;
- d) Meningkatnya sosialisasi produk-produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e) Meningkatnya pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah; dan
- f) Meningkatnya profesionalisme pegawai.

d. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu : sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran tersebut diupayakan berupa kuantitatif untuk memudahkan pengukuran. Sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a) Terlaksananya tingkat pencapaian Target Pendapatan Daerah minimal 10 % dari tahun sebelumnya;
- b) Terlaksananya penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi pelaporan tepat waktu;
- d) Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan tertib;
- e) Terlaksananya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan akuntabel;
- f) Terlaksananya pencapaian realisasi Pendapatan Daerah;
- g) Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai;
- h) Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis;
- i) Terlaksananya kegiatan sosialisasi Produk Hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- j) Terwujudnya kesadaran wajib pajak/ retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya;
- k) Terlaksananya system dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh Unit Kerja pengelola Pajak /Retribusi Daerah;
- l) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pegawai; dan
- m) Terwujudnya validasi data yang pasti dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal

9 ayat a sampai dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) kewenangan yakni :

1. Perencanaan dan pengendalian;
2. Pelatihan bidang pendapatan;
3. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan;
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan
5. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan daerah;
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan;
11. Penyusunan rencana bidang pendapatan;
12. Penyelenggaraan kualitas usaha jasa;
13. Penyelenggaraan sistim bidang pendapatan daerah;
14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah; dan
16. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4), terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Umum; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b) Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan
 - c) Seksi Dokumentasi dan Keberatan.
- d. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - a) Seksi Penagihan Retribusi Daerah;
 - b) Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan
 - c) Seksi Penagihan Penerimaan Lain-lain.
- e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan, membawahkan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penerimaan Lain-lain.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu :

- a. Kepala Dinas
 - a) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pendapatan;
 - c) Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan;
 2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendapatan;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan;
 4. Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendapatan;
 6. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a) Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - b) Bidang Penagihan; dan
 - c) Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan.
- b. Sekretaris
- a) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - b) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.
 - c) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengelolaan data;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum dan keuangan;
 3. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pendapatan;
 4. Penyelenggaraan ketatausahaan;
 5. Pembinaan Kepegawaian;
 6. Pengelolaan sarana dan prasarana;
 7. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 8. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
 9. Pengelolaan keuangan;
 10. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d) Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa / kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan – bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagaipedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- e) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), dibantu oleh Sub Bagian. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pendataan dan Penetapan

- a) Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b) Kepala bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan, dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Kepala bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan ;
 2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan pendafteran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d) Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- e) Kepala bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dibantu oleh kepala seksi. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
1. Seksi pendataan dan pendaftaran;
 2. Seksi perhitungan dan penetapan; dan
 3. Seksi dokumentasi dan keberatan.
- d. Bidang Penagihan
- a) Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
- c) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 2. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 4. Pengkoordinasian pengelolaan penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d) Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

- e) Kepala Bidang Pengihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

1. Seksi Penagihan Retribusi Daerah;
2. Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan
3. Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

- e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan

- a) Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan Penerimaan lain-lain.
- c) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil Pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 4. Pengkoordinasian pengelolaan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d) Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan

untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

e) Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi . Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

1. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. seksi Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
3. seksi evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

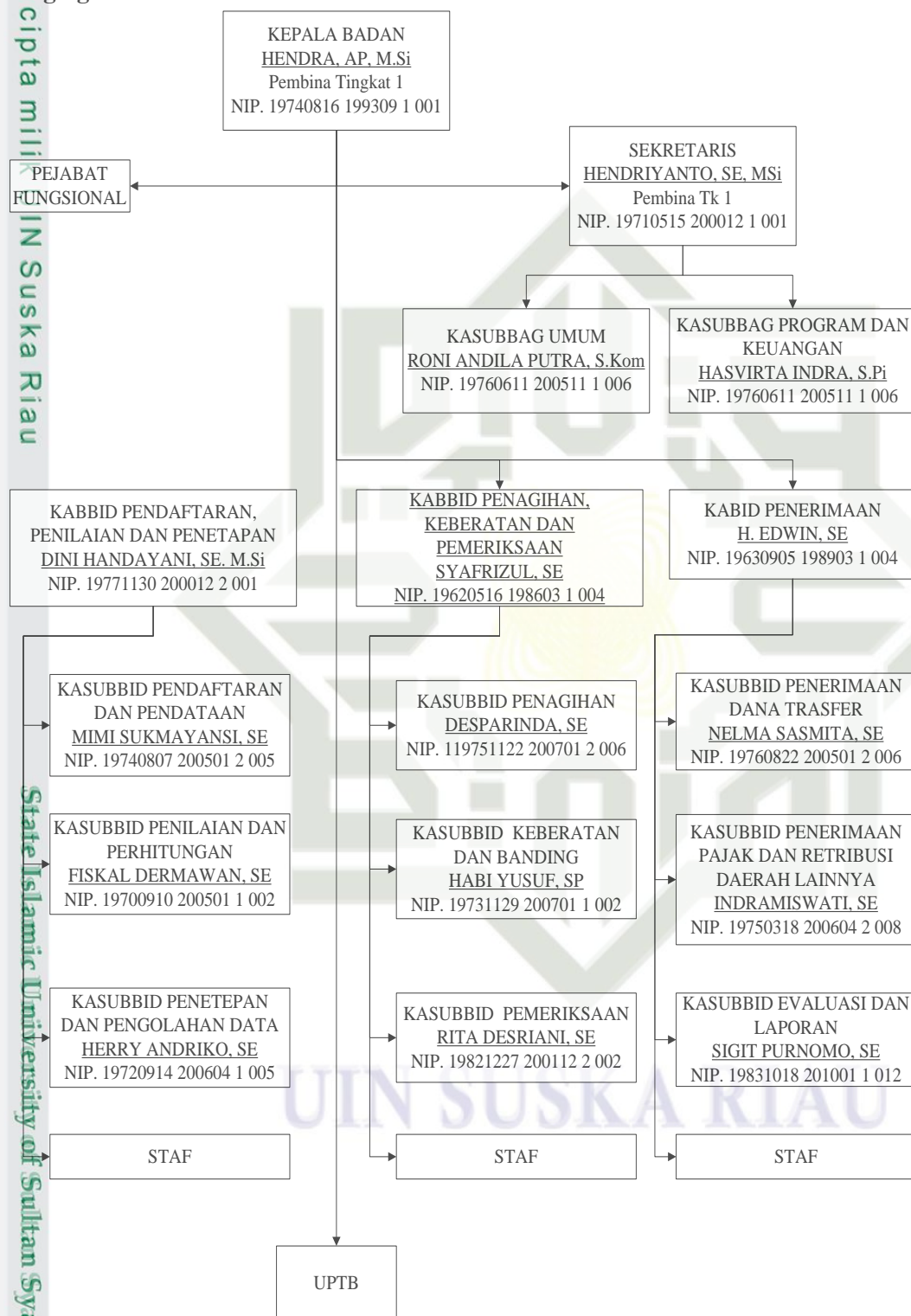
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Komunikasi

Adapun indikator-indikator yang ada dalam komunikasi, yaitu:

- a) Pada indikator transmisi, pelaksanaan kebijakan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam pemberian informasi sudah dilakukan berupa penyuluhan-penyuluhan dan media cetak mengenai pelaksanaan PBB-P2. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari belum meratanya penyuluhan-penyuluhan terhadap beberapa wajib pajak di kecamatan Pangean dan susah nya mengakses informasi terkait pembayaran PBB-P2.
- b) Pada indikator kejelasan, pelaksanaan kebijakan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pemberian informasi belum berjalan baik, yaitu dilakukan secara langsung terhadap target atau objek sasaran berupa penyuluhan-penyuluhan mengenai pelaksanaan PBB-P2 belum seluruhnya mendapatkan informasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta melalui media cetak yang berupa spanduk yang dipasang didepan kantor-kantor belum sampai kepada lapisan masyarakat di pedesaan.

- c) Pada indikator konsisten, pelaksanaan kebijakan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Perkotaan sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan penyuluhan-penyuluhan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak secara terus-menerus tanpa terputus setiap tahunnya.

Sumber Daya

Adapun indikator-indakator yang ada, sebagai berikut:

- a. Pada indikator Sumber Daya Manusia (staff), pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Perkotaan di kec. Pangean belum berjalan baik karena dari segi kuantitas sumber daya manusia (staf) belum mencakup keseluruhan wajib pajak dikarenakan jumlah yang sedikit dan tidak berperan aktif dalam memberikan motivasi kepada wajib pajak sehingga kurang berhasilnya kebijakan PBB-P2.
- b. Pada indikator sumber daya non manusia (sarana prasarana), dalam implementasi kebijakan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Perkotaan di kab. Kuansing sudah terpenuhi dengan baik yaitu dengan adanya fasilitas kantor yang mendukung pelayanan, seperti adanya tempat duduk, ruang yang luas, serta wifi.

Disposisi dalam implementasi kebijakan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Perkotaan di kab. Kuansing belum cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini belum siap dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan PBB-P2 dalam mengurus sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di kab. Kuansing dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada, sebagai berikut:

- a. Pada indikator Standar Operating Procedure (SOP) dalam implementasi kebijakan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di kab. Kuansing ini sudah berjalan baik dilihat dari aspek SOP dalam bentuk penunjukan petugas yang telah dipahami dan dijalankan secara detail tugas dan tanggung jawab oleh Koordinator dan kolektor/juru pungut sebagai pelaksana kebijakan PBB-P2 di kab. Kuansing.
- b. Pada indikator Fragmentasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di kab. Kuansing ini sudah berjalan baik dilihat dari telah terjalinnya koordinasi antar pelaksana kebijakan PBB-P2 di kab. Kuansing yaitu melalui kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah dan Kecamatan di kab. Kuansing.

Pemberian insentif ternyata belum mampu membangkitkan motivasi kerja pelaksana kebijakan yang dibuktikan dengan belum tercapainya target dan realisasi pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan di kecamatan Pangean. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah jangkauan geografis karena wilayah-wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedesaan yang jauh dan jangkauan pengawasan oleh badan pendapatan daerah terhadap para kolektor yang ada di desa mengingat karena jaraknya antara pusat pelayanan dengan wajib pajak dan subjek pajak agak berjauhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk terimplementasinya Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pangean Kab. Kuansing adalah lebih giat melakukan penagihan PBB-P2 dan pihak Bapenda harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun dengan melakukan penagihan aktif melalui surat paksa dan teguran sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan agar masyarakat takut untuk tidak membayar pajak.
- b. Badan Pendapatan Daerah juga harus menambah jumlah kolektor desa/kelurahan mengingat luasnya daerah yang harus dijangkau.
- c. Badan Pendapatan Daerah dan Kecamatan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan undian berhadiah kepada wajib pajak yang giat membayar pajak, agar dapat mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dan masyarakat lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Cet-12. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasalong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sahaan, Marihot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini; Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara.
- Withzal, Rivai, dkk. 2009. *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.
- Wirman Syafri. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Referensi Skripsi/ Jurnal:

- Arisman, Surya. 2015. *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar*. Universitas Hasanuddin.
- Atun, Supik. 2016. *Implementasi Perda. No. 1 Tahun 2013 Tentang Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau.
- Castina, Reza. 2016. *Implementasi Perda Kabupaten Inhil Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kecamatan Keritang)*. UIN SUSKA RIAU.
- Nurfitri, Sarah. 2015. *Pengaruh Penerbitan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Kosambi*. Universitas Multimedia Nusantara.
- Selbiah. 2015. *Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser*. Universitas Mulawarman

Referensi Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 2011. ***Perda Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan***.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 2013. ***Perda Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan***.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomoe 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pedoman Wawancara Pegawai



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INDIKATOR PENELITIAN	DAFTAR PERTANYAAN
1. Komunikasi	
a. Transmisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah menurut bapak/ibu Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah tersosialisasikan kepada wajib pajak ? 2. Bagaimana bentuk sosialisasi Perda tersebut kepada wajib pajak ? 3. Kapan saja disosialisasikan Perda tersebut dilakukan kepada wajib pajak ? 4. Berapa kali disosialisasikan Perda tersebut kepada wajib pajak ?
b. Kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah menurut bapak/ibu Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat dipahami oleh wajib pajak? 2. Apa saja kendala pemerintah dalam memberikan pemahaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		terhadap Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ?
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	c. Konsistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan senantiasa diterapkan oleh pemerintah kepada wajib pajak ? 2. Bagaimana bentuk konsistensi pemerintah dalam menerapkan Perda tersebut ? 3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan Perda tersebut kepada wajib pajak ?
2	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kuantitas dan kualitas aparat pemerintah sudah memadai dalam menerapkan perda tersebut kepada wajib pajak ? 2. Apa yang menjadi kendala
	a. Staf	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<p>kuantitas dan kualitas pemerintah tidak memadai dalam menerapkan perda tersebut ?</p>
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<p>b. Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparat pelaksana dalam menerapkan kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak telah memadai ? 2. Apa yang menyebabkan sarana dan prasarana tidak memadai dalam menerapkan kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak ?
3	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat bapak/ibu melihat fenomena penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini oleh wajib pajak ? 2. Bagaimana sikap pemerintah kepada wajib pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>mengalami penunggakan ?</p> <p>3. Adakah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak tersebut ?</p> <p>4. Apa saja bentuk sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang menunggak ?</p> <p>5. Apakah sanksi yang terdapat didalam perda tersebut benar-benar dilaksanakan ?</p>
4.	Struktur Birokrasi	
	<p>a. <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i></p>	<p>1. Adakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam mengimplementasikan perda tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tersebut ?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan perda tersebut ?</p>
	<p>b. Fragmentasi</p>	<p>1. Adakah bentuk kerjasama antar instansi terkait dalam mengkoordinasi kebijakan agar</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<p>benar-benar terimplementasi dengan baik kepada wajib pajak?</p> <p>2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh instansi terkait tersebut ?</p>
5	Insentif Pemungutan	<p>1. Apakah ada atau tidak insentif diberikan kepada petugas pajak apabila mencapai target ?</p> <p>2. Apakah petugas pajak selalu memberikan insentif setiap pencapaian ?</p> <p>3. Berapa jumlah insentif yang diberikan?</p> <p>4. Berapa bulan sekali insentif itu dikeluarkan ?</p>

Produktivitas Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	INDIKATOR PENELITIAN	DAFTAR PERTANYAAN
1	Komunikasi	
1. Cipta milik UIN Suska Riau	a. Transmisi	1. Apakah bapak/ibu mengetahui Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ?
		2. Apakah bapak/ibu pernah mendapat sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ?
		3. Siapa yang memberikan sosialisasi perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tersebut ?
		4. Darimana bapak/ibu mendapatkan sosialisasi perda tersebut ?
		5. Kapan bapak/ibu mendapatkan sosialisasi perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu memahami perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ? 2. Apa yang membuat bapak/ibu sulit memahami perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tersebut ? 3. Adakah pemerintah melakukan pertemuan dengan wajib pajak untuk memberikan pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ?
c. Konsistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu aparat pemerintah selalu melaksanakan pertemuan terhadap wajib pajak setiap tahunnya? 2. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu dengan Aparat yang selalu melakukan pertemuan kepada wajib pajak tersebut ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Sumber Daya	
2	<p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>a. Staf</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menurut bapak/ibu apakah Aparat pemerintah benar-benar melakukan penertiban kepada wajib pajak yang menunggak ? Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai tindakan aparat pemerintah kepada wajib pajak yang menunggak ?
	<p>b. Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah sarana dan prasarana dalam hal pembayaran pajak telah memadai ? Apakah dengan sarana dan prasarana tersebut menunjang pelayanan dalam membayar pajak?
3	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> Adakah sanksi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang menunggak ? Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sanksi dari pemerintah ketika menunggak dalam pembayaran pajak ? Apa saja bentuk-bentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<p>pemberian sanksi yang diberikan oleh pemerintah ?</p> <p>4. Apakah menurut bapak/ibu sanksi ini sesuai diterapkan kepada wajib pajak yang menunggak ?</p>
4	Struktur Birokrasi	
	a. Fragmentasi	<p>1. Apakah bapak/ibu aparat pemerintah secara langsung mengantarkan SPPT kerumah wajib pajak ?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu melihat pemerintah melakukan koordinasi/kerjasama dengan instansi/pihak kecamatan dalam menghimbau kepada wajib pajak agar membayar pajak?</p>

Wawancara dengan Pegawai

1. Diilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN**



**BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2013**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013, dipandang perlu melakukan perubahan atas besaran tarif yang dikenakan terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



Pasal I

Ketentuan Bab III Pasal 6 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 18), diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6"

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar:

- 0,1 % (nol koma satu persen) : untuk NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 0,2 % (nol koma dua persen): untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar.) rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)
- 0,3 % (nol koma tiga persen) : untuk NJOP diatas RP.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Januari 2013

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Drs. H. MUHARMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19570901 197701 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013 NOMOR 1



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 27 Maret 2017

Nomor : 970/Bapenda- Umum/III/2017/48
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth;
1. Kepala Dinas/Badan/Kantor
2. Camat
Kabupaten Kuantan Singingi
Di-

TEMPAT

Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat yang memerlukan pelayanan pada Dinas/Badan/Instansi/Kantor agar melampirkan Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017 dan Tahun 2016 kebawah / lima tahun terakhir (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang PBB-P2.
2. Untuk wajib pajak perusahaan/badan usaha yang akan melakukan pengurusan perizinan, disamping Bukti Lunas PPB P2 juga diminta melampirkan bukti lunas pajak daerah dan retribusi lainnya yang terkait.
3. Selanjutnya kepada Camat untuk menginformasikan kepada masyarakat atau wajib pajak pribadi/badan atau perusahaan yang belum memiliki SPPT PBB P2, dapat mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto copy KTP
 2. Foto copy Surat Tanah/Sertifikat/SKGR
 3. Foto copy Kartu Keluarga
 4. Surat Kuasa bermaterai (jika diwakilkan)
 5. Mengisi Blanko Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampirannya (Diambil/disediakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)
 6. Fotocopy IMB (bagi wajib pajak Badan/Perusahaan)
 7. Fotocopy SPPT PBB P2 Induk (bagi yang objeknya dipecah)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Drs. H. MURSINI, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
2. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.





PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts. 174/ VI / 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB, KOORDINATOR
SERTA JURU PUNGUT / KOLEKTOR DESA / KELURAHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKEBUNAN DI WILAYAH
KECAMATAN DALAM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang

- : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan merupakan salah satu Sumber Penerimaan Daerah ;
- b. bahwa untuk kelancaran Pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan serta PBB sektor Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2017 perlu ditunjuk dan ditetapkan Petugas sebagai Penanggung Jawab, Koordinator dan Juru Pungut Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas sebagai Penanggung Jawab, Koordinator serta Juru Pungut Desa/Kelurahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 Tanggal 28 Desember 1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur KDH Tingkat I dan atau / Bupati / Walikota Madya Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1008/ KMK.04 / 1985 Tanggal 28 Desember 1985 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dari Pejabat dalam Jabatannya berkaitan langsung dengan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1009 / KMK.04 / 1985 Tanggal 28 Desember 1985 Tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14/4874 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
13. Keputusan bersama Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri Nomor : 31/ PJ.7/ 1986 tentang Imbangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 2)

17. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 12);

Memperhatikan: Berita Acara Surat tanda Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Asset Sitaan Nomor : BA-/WPJ.02/np.061/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penunjukan Petugas Sebagai Penanggung Jawab, Koordinator serta Juru Pungut Desa / Kelurahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan di Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Bahwa yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk dilibatkan sebagai Penanggung Jawab, Koordinator, dan Juru Pungut Desa/ Kelurahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta PBB Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017;

KETIGA

: Camat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Pemungutan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinir Pelaksanaan Pungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta PBB Perkebunan bersama-sama dengan Koordinator, Juru pungut Desa / Kelurahan yang telah ditetapkan;
2. mengawasi Operasional Pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta PBB Perkebunan dalam wilayah kerjanya;
3. melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Koordinator, Juru Pungut Desa/Kelurahan PBB, Lurah, Kepala Desa Minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk

mengevaluasi hasil pungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta PBB Perkebunan serta membahas masalah-masalah yang di temui dalam melaksanakan pungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan PBB Perkebunan di Wilayah Kerjanya;

4. melaporkan Realisasi Penerimaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dan PBB Perkebunan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, serta permasalahan yang dihadapi kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Pendapatan Daerah;

KEEMPAT

: Koordinator Kecamatan mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. membantu Camat dalam Operasional Pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta PBB Perkebunan;
2. mengkoordinir serta mengawasi para Juru Pungut Desa/Kelurahan untuk menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak serta melaksanakan Penagihan di Wilayah Kerjanya;
3. menyampaikan Laporan Realisasi PBB dalam kurun waktu 1 (satu) kali dalam sebulan serta permasalahan yang dihadapi, baik yang bersifat teknis maupun administrasi kepada Camat;

KELIMA

: Juru Pungut Desa/Kelurahan mempunyai Tugas dan Tanggung sebagai berikut:

1. menyampaikan SPPT PBB sektor Perdesaan/Perkotaan serta PBB Perkebunan langsung kepada Wajib Pajak;
2. melaksanakan Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta PBB Perkebunan kepada Wajib Pajak untuk melunasi kewajiban Pembayaran PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan serta PBB Perkebunan TA. 2017 dan tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya sebelum jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;
3. bertindak aktif dalam memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk melunasi kewajiban Pembayaran PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan PBB Perkebunan TA. 2017 ;
4. menyampaikan, Mengevaluasi dan Melaporkan Data Baru, Data Perubahan terkait objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Objek PBB Perkebunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Perubahan SPOP dan Data Perubahan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ;
5. memberikan Laporan kepada Koordinator terhadap Realisasi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan PBB Perkebunan minimal 1 (Satu) kali dalam sebulan serta permasalahan yang di temui di lapangan ;

KEENAM : Terhadap Petugas yang telah di tunjuk sebagai Penanggung Jawab, Koordinator dan Juru Pungut Desa/ Kelurahan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diberikan Insentif sesuai dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2017.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI.

H. M U R S I N I

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Plt. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
5. Yang bersangkutan

TANGGAL : 20 Juni 2017

NO	N A M A	JABATAN		WILAYAH KERJA KELURAHAN/DESA	KETERANGAN	
		STRUKTUR	JABATAN		Perdesaan	Perkotaan
I. KEC. CERENTI						
1	Arta Melia, SSTP, MSI	Camat Cerenti	Penanggung Jawab	Kec. Cerenti	Perdesaan	Perkotaan
2	Agus Supriyanto, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Cerenti		
3	Mardius	Kasubag Program	Koordinator	Kec. Cerenti		
4	Khairon Toni, S.Sos	Staf Kelurahan	Kolektor	Pasar Cerenti		
5	Sulasri	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Peraku		
6	Elinidra	Perangkat Desa	Kolektor	Kampung Cerenti		
7	Yeniata	Perangkat Desa	Kolektor	Pesikaian		
8	Aprinus	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Panjang Cerenti		
9	Marwan	Perangkat Desa	Kolektor	Kompe Berangin		
10	Syamsir. KS	Perangkat Desa	Kolektor	Teluk Pauh		
11	Jonedi	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Jambu		
12	Asril	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Cerenti		
13	Yuli Erni	Perangkat Desa	Kolektor	Sikakak		
14	Bahnawir	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Bayur		
15	Erwan Usman	Perangkat Desa	Kolektor	Kampung Baru Timur		
16	Sabran	Perangkat Desa	Kolektor	Tanjung Medan		
II. KEC. HULU KUANTAN						
1	Hamiyudin, S.Sos	Camat Hulu Kuantan	Penanggung Jawab	Kec. Hulu Kuantan	Perdesaan	Perkotaan
2	Suhardi, SP	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Hulu Kuantan		
3	Lukman, S.Pd	Kasi Trantib	Koordinator	Kec. Hulu Kuantan		
4	Marhalim	Perangkat Desa	Kolektor	Lubuk Ambacang		
5	Asri Aswandi	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Pinang		
6	Ulul Ilmi	Perangkat Desa	Kolektor	Tanjung		
7	Tomi Priogo	Perangkat Desa	Kolektor	Sei. Alah		
8	Salman	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Kombu		
9	Rabdes Kurniawan	Perangkat Desa	Kolektor	Mudik Ulo		
10	Wahid	Perangkat Desa	Kolektor	Inuman		
11	Adi Chondrak	Perangkat Desa	Kolektor	Sumber: Inuman		
12	Debi Kurniawan	Perangkat Desa	Kolektor	Simpulan laporan		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pendiseminasian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau suatu masalah.						

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritikan atau suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. AMBUT		Perangkat Desa	Kolektor	Penghasilan Induk	Perdesaan
6	Rahmad Kartolo	Sekretaris Desa	Kolektor	Pulau Padang	Perdesaan
7	Nova Betri		Kolektor	Kebun Lado	Perdesaan
8	Depriandi		Kolektor	Logas	Perdesaan
9	Hardoyo	Sekretaris Desa	Kolektor	Logas Hilir	Perdesaan
10	Suparjo	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Sirih	Perdesaan
11	Agus Prasetyo	Perangkat Desa	Kolektor	Air Emas	Perdesaan
12	Tri Palguna	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Bawang	Perdesaan
13	Chalifuddin	Kepala Dusun	Kolektor	Sungai Kuning	Perdesaan
14	Maisopar	Sekretaris Desa	Kolektor	Pasir Emas	Perdesaan
15	Atiman	Sekretaris Desa	Kolektor	Petai Baru	Perdesaan
16	Suseno	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Keranji	Perdesaan
17	Habib Khairudin	Perangkat Desa	Kolektor	Sumber Datar	Perdesaan
V. KEC. KUANTAN HILIR SEBERANG					
1	Drs. Akhyani Armofis	Camat Kuantan Hilir Seberang	Penanggung Jawab	Kec. Kuantan Hilir Seberang	
2	Guntu Mahyadi, SE	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Kuantan Hilir Seberang	
3	Yudepi, SE	Staf Keuangan Kecamatan	Koordinator	Kec. Kuantan Hilir Seberang	
4	Perianto	Perangkat Desa	Juru Pungut	Pulau Baru	Perdesaan
5	Bustami	Perangkat Desa	Juru Pungut	Pulau Beralo	Perdesaan
6	Martono	Perangkat Desa	Juru Pungut	Pulau Kulur	Perdesaan
7	Kurnia	Perangkat Desa	Juru Pungut	Pelukahan	Perdesaan
8	Zulham	Perangkat Desa	Juru Pungut	Pengalihan	Perdesaan
9	Kasriwardana	Perangkat Desa	Juru Pungut	Lumbok	Perdesaan
10	Yusmadi	Perangkat Desa	Juru Pungut	Teratak Jering	Perdesaan
11	Daswir	Perangkat Desa	Juru Pungut	Tanjung Pisang	Perdesaan
12	R. Yosi Saputra	Perangkat Desa	Juru Pungut	Danau	Perdesaan
13	Siparudin	Perangkat Desa	Juru Pungut	Kasang Limau Sundai	Perdesaan
14	Supratman	Perangkat Desa	Juru Pungut	Koto Rajo	Perdesaan
15	Rano Karno	Perangkat Desa	Juru Pungut	Tanjung	Perdesaan
16	Suharto	Perangkat Desa	Juru Pungut	Sungai Sorik	Perdesaan
17	Marliyus	Perangkat Desa	Juru Pungut	Rawang Oguang	Perdesaan
VI. KEC. KUANTAN MUDIK					
1	Drs. Javrian Afriady, M.Si	Camat Kuantan Mudik	Penanggung Jawab	Kec. Kuantan Mudik	
2	Elmegawati, AR, SP	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Kuantan Mudik	
3	Yanti Dusti, S.Pi	Undang Kasubbag Keuangan	Koordinator	Kec. Kuantan Mudik	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Kuaki Damai	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Manau	Perdesaan
7	Fastor	Perangkat Desa	Kolektor	Bukit Kauman	Perdesaan
8	Zulfikar	Perangkat Desa	Kolektor	Aur Duri	Perdesaan
9	Basken	Perangkat Desa	Kolektor	Kinali	Perdesaan
10	Yakarnadi	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Lb. Jambi	Perkotaan
11	Ajis Aprianto	Perangkat Desa	Kolektor	Kasang	Perkotaan
12	Jontrisal	Perangkat Desa	Kolektor	Banjar Padang	Perkotaan
13	Vina	Perangkat Desa	Kolektor	Seberang Pantai	Perkotaan
14	Sulthipar	Perangkat Desa	Kolektor	Rantau Sialang	Perkotaan
15	Hendrianto	Perangkat Desa	Kolektor	Luai	Perkotaan
16	Safimeng Syam	Sekretaris Desa	Kolektor	Banjar Guntung	Perdesaan
17	Yusnar	Perangkat Desa	Kolektor	Bkt. Pedusunan	Perdesaan
18	Aryadi	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Binjai	Perdesaan
19	Donal Putra, S.Pt	Sekretaris Desa	Kolektor	Pebaun Hilir	Perdesaan
20	Refnaldi	Sekretaris Desa	Kolektor	Pebaun Hulu	Perdesaan
21	Abdilla	Sekretaris Desa	Kolektor	Saik	Perdesaan
22	Sidas	Perangkat Desa	Kolektor	Sangau	Perdesaan
23	Westri Astari	-	Kolektor	Koto Cengar	Perdesaan
24	Yopi Kusnadi	Perangkat Desa	Kolektor	Seb. Cengar	Perdesaan
25	Sutikno	Sekretaris Desa	Kolektor	Lubuk Ramo	Perdesaan
26	Alpizal	Perangkat Desa	Kolektor	Pantai	Perdesaan
27	Sumardi Idris	Sekretaris Desa	Kolektor	Air Buluh	Perdesaan
VII KEC. PUCUK RANTAU					
1	Herman Susilo, S.Sos, M.Si	Camat Pucuk Rantau	Penanggung Jawab	Kec. Pucuk Rantau	Perdesaan
2	Harjunaidi, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Pucuk Rantau	Perdesaan
3	Arian Wilsadinata, S.Ag	Kasi Pemerintahan	Koordinator	Kec. Pucuk Rantau	Perdesaan
4	Arman.B	Perangkat Desa	Kolektor	Perhentian Sungkai	Perdesaan
5	Arbi	Perangkat Desa	Kolektor	Ibul	Perdesaan
6	Jamaris	Perangkat Desa	Kolektor	Muara Petai	Perdesaan
7	Mardinis, S.Hi	Perangkat Desa	Kolektor	Pangkalan	Perdesaan
8	Aprinaldi	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Besar	Perdesaan
9	Abdurrahim	Perangkat Desa	Kolektor	Setiang	Perdesaan
10	Kapriinedi	Perangkat Desa	Kolektor	Muaro Tiung Makmur	Perdesaan
11	Syafrin	Perangkat Desa	Kolektor	Muaro Tobek	Perdesaan
12	Temles Kamir	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Besar Hilir	Perdesaan

Disusun oleh: **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	UIN Puteh Alai, S.IP	Camat Logas Tanah Darat	Penanggung Jawab	Kec. Logas Tanah Darat	Perkotaan
2	Brides Hinderlyn, SP	Sekretaris Camat	Penanggung Jawab	Kec. Logas Tanah Darat	Perkotaan
3	Yepnedi, SP	Kasi Pemerintahan	Koordinator	Kec. Logas Tanah Darat	Perkotaan
4	Sudirman, J	Perangkat Desa	Kolektor	Perhentian Luas	Perkotaan
5	Mosriadi	Perangkat Desa	Kolektor	Logas	Perkotaan
6	Pesri Irawan	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Rambai	Perkotaan
7	Nengsi Warlis	Perangkat Desa	Kolektor	Lubuk Kebun	Perkotaan
8	Zuldi Hermantoni	Perangkat Desa	Kolektor	Situgal	Perkotaan
9	Doni Afriansyah	Perangkat Desa	Kolektor	Teratak Rendah	Perkotaan
10	Ise Putra. S.Si	Perangkat Desa	Kolektor	Rambahan	Perkotaan
11	Rudi Wartono	Perangkat Desa	Kolektor	Sikijang	Perkotaan
12	Ujang Badrussalam	Perangkat Desa	Kolektor	Sukaraja	Perkotaan
13	Munirul Hakim	Perangkat Desa	Kolektor	Sako Margasari	Perkotaan
14	Nasiri	Perangkat Desa	Kolektor	Kuantan Sako	Perkotaan
15	Wahyudi	Perangkat Desa	Kolektor	Hulu Teso	Perkotaan
16	Maryanto	Perangkat Desa	Kolektor	Giri Sako	Perkotaan
17	Wagiran	Perangkat Desa	Kolektor	Bumi Mulya	Perkotaan
18	Tuari	Perangkat Desa	Kolektor	Sidodadi	Perkotaan
IX. KEC. SINGINGI HILIR					
1	Hazrianto, S.Sos	Camat Singingi Hilir	Penanggung Jawab	Kec. Singingi Hilir	Perkotaan
2	Desy Edyaningsih, SE	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Singingi Hilir	Perkotaan
3	Joni Masriadi, Sos	Kasi Pemerintahan	Koordinator	Kec. Singingi Hilir	Perkotaan
4	Anjas Wandri / Abdullah Zen	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Baru	Perkotaan
5	Budi Utomo	Perangkat Desa	Kolektor	Petai	Perkotaan
6	Yuliantoni	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Paku	Perkotaan
7	Marjohan/ Hasri Irawan	Perangkat Desa	Kolektor	Tanjung Pauh	Perkotaan
8	Ujang Jumami/ Kasimun	Perangkat Desa	Kolektor	Sukamaju	Perkotaan
9	Nurjaeni	Perangkat Desa	Kolektor	Beringin Jaya	Perkotaan
10	Anwar Nasution/ Refliono	Perangkat Desa	Kolektor	Bukit Raya	Perkotaan
11	Paryo	Perangkat Desa	Kolektor	Suka Damai	Perkotaan
12	Ahmad Muh Tadir/ Syamsul	Perangkat Desa	Kolektor	Sumber Jaya	Perkotaan
13	Marsum	Perangkat Desa	Kolektor	Muara Bahan	Perkotaan
14	Sunartin/ Tumiat	Perangkat Desa	Kolektor	Simpang Raya	Perkotaan
15	Agus Nuryana	Perangkat Desa	Kolektor	Sei Buluh	Perkotaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1	Inta Supeni	Kasi Trantib	Koordinator	Kec. Sentajo Raya	Perdesaan
4	Yudasril	Staf Lurah Beringin Jaya	Kolektor	Beringin Jaya	Perdesaan
5	Nur Asneri	Kaur Umum	Kolektor	Jalur Patah	Perdesaan
6	Zulpindra	Kaur Umum	Kolektor	Teratak Air Hitam	Perdesaan
7	Wandi	-	Kolektor	Parit Teratak Air Hitam	Perdesaan
8	Delfazen	-	Kolektor	Seberang Teratak Air Hitam	Perdesaan
9	Indra Miko	Sekretaris Desa	Kolektor	Pulau Kopung Sentajo	Perdesaan
10	Nafariyon	Kasi Pemerintahan	Kolektor	Kampung Baru Sentajo	Perdesaan
11	Masri	-	Kolektor	Koto Sentajo	Perdesaan
12	Markapilis	-	Kolektor	Muaro Sentajo	Perdesaan
13	Eko Susilo	Kasi Pembangunan	Kolektor	Pulau Komang Sentajo	Perdesaan
14	Nasibah	Kepala Dusun	Kolektor	Geringging Baru	Perdesaan
15	Aditya Isnen Nurojab	Kasi Pemerintahan	Kolektor	Geringging Jaya	Perdesaan
16	Suwarsid	Kasi Pemerintahan	Kolektor	Marsawa	Perdesaan
17	H. Suwanto	Sekretaris Desa	Kolektor	Langsat Hulu	Perdesaan
18				Muara Langsat	Perdesaan
XI. KEC. BENAI					
1	Yuhendra, S.Sos	Camat Benai	Penanggung Jawab	Kec. Benai	Perdesaan
2	Delfides Gusni, M.Si	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Benai	Perdesaan
3	Andi Kristian, S.Sos	Kasubag Program	Koordinator	Kec. Benai	Perdesaan
4	Rudi Hartono	Sekretaris Desa	Kolektor	Siberakun	Perdesaan
5	Hasta Ifriadi	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Benai	Perdesaan
6	Yunius	Perangkat Desa	Kolektor	Banjar Benai	Perdesaan
7	Ade Nopriyon	Perangkat Desa	Kolektor	Gunung Kesiangan	Perdesaan
8	Salfentri	Sekretaris Desa	Kolektor	Ujung Tanjung	Perdesaan
9	Ali Afrizal	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Tongah	Perdesaan
10	Sardi	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Lancang	Perdesaan
11	Irfan Nadi	Perangkat Desa	Kolektor	Talontam	Perdesaan
12	Jasman	Perangkat Desa	Kolektor	Benai Kecil	Perdesaan
13	Masdiana	Perangkat Desa	Kolektor	Kelurahan Pasar Benai	Perdesaan
14	Ashari Virgo	Perangkat Desa	Kolektor	Simandolak	Perdesaan
15	Saherman Salis	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Ingu	Perdesaan
16	Jasmidi	Perangkat Desa	Kolektor	Tebing Tinggi	Perdesaan
17	R. Anwar Yusuf	Sekretaris Desa	Kolektor	Pulau Kalimanting	Perdesaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

XII. KEC. PANGEAN

1	Budi Asrianto, S.Sos, M.Si	Camat Pangean	Penanggung Jawab	Kec. Pangean	Perkotaan
2	Irhandi, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Pangean	Perkotaan
3	Eddra Mandahris, S.Sos	Kasubag Keuangan	Koordinator	Kec. Pangean	Perkotaan
4	Ilham	Sekretaris Desa	Kolektor	Pasar Baru Pangean	Perkotaan
5	Deden Supendi	Sekretaris Desa	Kolektor	Pembatang	Perkotaan
6	Rustam Effendi	Sekretaris Desa	Kolektor	Padang Kunik	Perkotaan
7	Abdurrahman	Perangkat Desa	Kolektor	Padang Tanggung	Perkotaan
8	Zulrafit	Perangkat Desa	Kolektor	Teluk Pauh	Perkotaan
9	Idris	Sekretaris Desa	Kolektor	Tanah Bekali	Perkotaan
10	Kasmijon	Sekretaris Desa	Kolektor	Pulau Deras	Perkotaan
11	Bakriadi	Sekretaris Desa	Kolektor	Pulau Kumpai	Perkotaan
12	Harkenzon	Sekretaris Desa	Kolektor	Pulau Tengah	Perkotaan
13	Enengsi Hudra	Sekretaris Desa	Kolektor	Sukaping	Perkotaan
14	Wasir	Sekretaris Desa	Kolektor	Pulau Rengas	Perkotaan
15	Darmawan	Sekretaris Desa	Kolektor	Pauh Angit	Perkotaan
16	Arman	Sekretaris Desa	Kolektor	Koto Pangean	Perkotaan
17	Masyuri	Kaur Pemerintahan	Kolektor	Rawang Binjai	Perkotaan
18	Elvi Junaidi	Perangkat Desa	Kolektor	Sungai Langsat	Perkotaan
19	Hendri Dunan	Kadus	Kolektor	Sako	Perkotaan
20	Lunasri	Perangkat Desa	Kolektor	Pauh Angit Hulu	Perkotaan

XIII. KEC. GUNUNG TOAR

1	Sada Risnah, SSTP, M.Si	Camat Gunung Toar	Penanggung Jawab	Kec. Gunung Toar	Perkotaan
2	Herry Haryadi, SH	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Gunung Toar	Perkotaan
3	Hendra, SE	Kasubag Keuangan	Koordinator	Kec. Gunung Toar	Perkotaan
4	Aprisal	Perangkat Desa	Kolektor	Kampung Baru	Perkotaan
5	Mitra Handoko	Perangkat Desa	Kolektor	Petapahan	Perkotaan
6	Jospion	Perangkat Desa	Kolektor	Toar	Perkotaan
7	Nurhayati	Perangkat Desa	Kolektor	Gunung	Perkotaan
8	Dalisar	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Gunung	Perkotaan
9	Edi Herianto	Perangkat Desa	Kolektor	Pisang Berebus	Perkotaan
10	Risman	Perangkat Desa	Kolektor	Lubuk Terentang	Perkotaan
11	Edi Warman	Perangkat Desa	Kolektor	Siberobah	Perkotaan
12	Hasmadi	Perangkat Desa	Kolektor	Teberau Panjang	Perkotaan



UIN SUSKA RIAU

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber, menyebutkan sumbu
- Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15	Yoserizal	Perangkat Desa	Kolektor	Teluk Beringin	Perdesaan
16	Rabbi Irawan	Perangkat Desa	Kolektor	Seberang Sungai	Perdesaan
17	M. Yasir	Perangkat Desa	Kolektor	Seberang Gunung	Perdesaan
XIV. KEC. KUANTAN HILIR					
1	Drs. Yulfides	Camat Kuantan Hilir	Penanggung Jawab	Kec. Kuantan Hilir	Perkotaan Perkotaan
2	Tarmizi Ali, S.Pd	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Kuantan Hilir	
3	Muhammad, SE	Kasubag Program	Koordinator	Kec. Kuantan Hilir	
4	Devi Herlina/ Bella Arista	Perangkat Desa	Kolektor	Pasar Baru Baserah	
5	Herlisman	Perangkat Desa	Kolektor	Pasar Usang Baserah	
6	Yusran	Perangkat Desa	Kolektor	Simpang Pulau Beralo	
7	Jamarin	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Kijang	
8	Sarkawi	Perangkat Desa	Kolektor	Kampung Madura	
9	Masri Ramadhan	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Tuo	
10	Dadang Irawan	Perangkat Desa	Kolektor	Banuaran	
11	Husnizar	Perangkat Desa	Kolektor	Simpang Pulau Beralo	
12	Azwar Anas	Perangkat Desa	Kolektor	Rawang Bonto	
13	Firdaus	Perangkat Desa	Kolektor	Dusun Tuo	
14	Edi Hariadi	Perangkat Desa	Kolektor	Teratak Baru	
15	Maizul Ependi	Perangkat Desa	Kolektor	Gunung Melintang	
16	Syarial	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Madinah	
17	Budi Darmaindah	Perangkat Desa	Kolektor	Kampung Tengah	
18	Prima Wahyudi	Perangkat Desa	Kolektor	Kepala Pulau	
19	Zulfan	Perangkat Desa	Kolektor	Kampung Medan	
XV. KEC. INUMAN					
1	Sardi Syam, S.Sos	Camat Inuman	Penanggung Jawab	Kec. Inuman	Perkotaan
2	Joni, SP	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab	Kec. Inuman	
3	Edi Sugemi, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Koordinator	Kec. Inuman	
4	Putriwati	Kepala Dusun II	Kolektor	Pasar Inuman	
5	Antonius Abni. S	Perangkat Desa	Kolektor	Koto Inuman	
6	Khaidir Mustapa	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Busuk Jaya	
7	Marlijus	Perangkat Desa	Kolektor	Sigaruntang	
8	Alismar	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Busuk	
9	Umar Ali	Perangkat Desa	Kolektor	Seb. Pulau Busuk	
10	Conriadi	Perangkat Desa	Kolektor	Pulau Sipan	
11	Castiur	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Kolektor	Pulau Panjang Hulu	

Perangkat Desa	Kolektor	Daftar Nam Tiga	Perdesaan
Perangkat Desa	Kolektor	Bedeng Sikuran	Perdesaan
Perangkat Desa	Kolektor	Kampung Baru Koto	Perdesaan
Sekretaris Desa	Kolektor	Lebuh Lurus	Perdesaan
		Ketaping Jaya	Perdesaan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. MURSINI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4150/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 16 Juni 2017 M
21 Ramadhan 1438 H

Kepada
Yth. **Mustiqowati Ummul F. M..Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

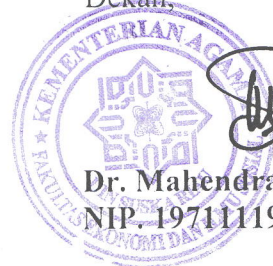
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Septi Nopandri
NIM : 11375201574
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ed
NIP. 19711119 200501 1 004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail:feconsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4884/2017
ifat : Biasa
ampiran : -
al : Izin Riset

Pekanbaru, 16 Agustus 2017 M
23 Zulqaidah 1438 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Septi Nopandri
NIM. : 11375201574
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
**"Impelentasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)"** Untuk
itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ed
NIP. 19711119 200501 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telp (0760) 561625 – 561626

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 970/Bapenda-KS/II/2018/20

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan, bahwa

Nama : SEPTI NOPANDRI
NIM : 11375201574
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Telah melaksanakan Observasi Kerja Praktek di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mulai tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan 05 Februari 2018, yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik, serta bekerja sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 19 Februari 2018

an. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIS

MULYADI, SE, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19670501 199205 1 002



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak isi dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR CAMAT PANGEAN
Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp
PANG EAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 071/PGN-UM/2018/ 17

Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa

Nama : SEPTI NOVANDRI
Nim : 11375201574
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru

Yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANGEAN KECAMATAN
PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)”.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Di : Pangean
Pada tanggal : 29 Januari 2018

A.n. CAMAT PANGEAN
Sekcam



IRHANDI, S.Sos
NIP. 19710220 200012 1 001

Sta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 561574 FAX. (0760) 561576 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

No. 071/ DPMPSTPTK-R/I/2018/12

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/8211 Tanggal 24 Agustus 2017.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama
NIM
Jurusan

Jenjang Pendidikan
Alamat
Judul Penelitian

: SEPTI NOPANDRI
: 11375201574
: ADMINISTRASI NEGARA
: FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

: S1
: PEKANBARU
: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)"

Untuk melakukan Penelitian di : KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

DIBUAT DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 05 Januari 2018

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kabid Perizinan dan Non Perizinan



HERRY YUSMAN, S.Pt
NIP. 19700518 200501 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS

SEPTI NOPANDRI, Lahir di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 09 September 1995. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 015 Pasarbaru Kecamatan Pangean tahun 2000-2006 serta melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pangean Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2007-2010. Dan melanjutkan pendidikan di MAN Pangean pada tahun 2011-2013. Penulis hidup dan dibesarkan dilingkungan keluarga yang sederhana serta memiliki budaya islami yang fanatik. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur PBUD dengan Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Pada tanggal 18 Januari – 26 Februari 2015 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Bagian Perlengkapan. Kemudian pada tanggal 21 Juli – 28 Agustus 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis pernah mengambil eskul PIK-Remaja dan mengikuti lomba Ajang Prestasi Remaja (APR) tahun 2012 di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Berkat Karunia dan Rahmat ALLAH SWT, penulis menyelesaikan Studi Strata Satu pada tanggal 27 September 2019 dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”. Dibawah bimbingan Ibuk Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si dan menyandang gelar Sarjana Administrasi Publik/ Serjana Sosial (S.Ap/ S.Sos).